

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM
EKOWISATA DI KOTA TERNATE**



**TAPM diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Ilmu
Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NAMA : NURDINA

NIM : 014944499

UPBJJ : TERNATE

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2010

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Program Ekowisata
di Kota Ternate adalah hasil karya saya sendiri, serta
Saya sendiri, dari seluruh sumber yang di kutip maka,
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Jakarta, 9 November 2010

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANGUN NEGARA
TGL



32F52AAF346487967

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

(NURDINA)

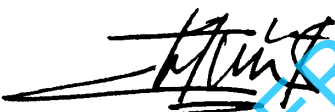
NIM: 014944499

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

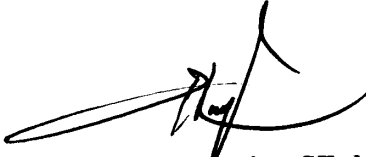
PERSETUJUAN (TAPM)

Judul TAPM : EVALUASI PROGRAM EKOWISATA DI KOTA
TERNATE.
NAMA : NURDINA
NIM : 014944499
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PEMBIMBING I

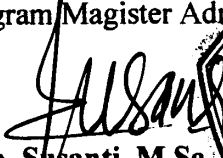

Dr. Anwar Hasjim, Drs. Msi
Nip: 630 007 863

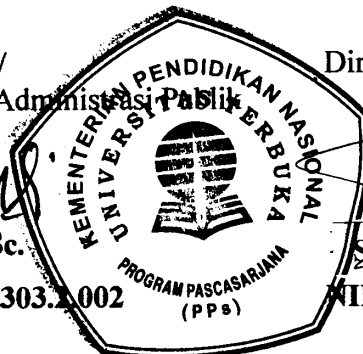
PEMBIMBING II


Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si
Nip. 132 297 069


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik


Dra. Susanti, M.Sc.
NIP.19671214.199303.1002



Direktur Program Pascasarjana


Suciati, M.Sc., Ph. D.
NIP.19520213.198503.2.001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : NURDINA
NIM : 014944499
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : EVALUASI PROGRAM EKOWISATA DI KOTA
TERNATE.


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

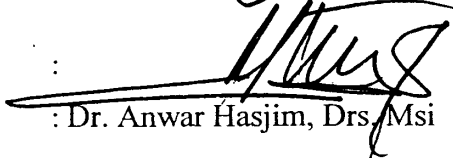
Hari/Tanggal : Jumat, 9 Oktober 2010.
Waktu : 15:30 – 17.30 WIT

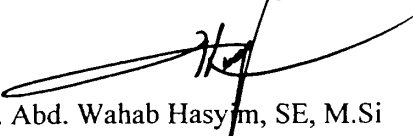
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : 
Nama : Suciati, M.Sc., Ph. D.

Penguji Ahli : 
Nama : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum

Pembimbing I : 
Nama : Dr. Anwar Hasjim, Drs, Msi

Pembimbing II : 
Nama : Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si

ABSTRACT**THE PROGRAM EVALUATION OF ECOTOURISM
AT TERNATE CITY.**

Nurdina
Universitas Terbuka
Andin gjd@yahoo.com

Key Words: evaluation of program, ecotourism, strategic planning.

Endeavoring to realize of Ternate's visi and missi development as the culture city based on the real potential and variety tours. Sulamadaha beach is one of the icon development that rely on but, it has impact on the environment borders on the tourist area. The research focus on the evaluation strategis program ecotourism in Ternate city.

The research using descriptive method with qualitative approach in technic of collecting data, the researcher make the indepth interview, observation and documentation after that take conclude explain that management of program implementation strategic did not conform target, the minimize quality and supervision has impact on the environment problems to the Ternate touris area. Then, have to follow paradigm exapnd model oriented toward protect, conservation environment and endeavoring support on ecotourism activity.

ABSTRAK**EVALUASI PROGRAM EKOWISATA DI KOTA TERNATE.**

Nurdina

Universitas Terbuka

Andin.gjd@yahoo.com

Kata kunci : evaluasi program, ekowisata, perencanaan strategis.

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan kota Ternate sebagai kota Budaya dan Pariwisata adalah berdasarkan pada potensi dan keragaman daya tarik wisata. Kawasan pantai Sulamadaha merupakan salah satu prioritas sekaligus *icon* pembangunan kepariwisataan yang diandalkan namun, dampak pembangunan kepariwisataan menimbulkan degradasi lingkungan di kawasan objek wisata tersebut. Fokus penelitian ini berkisar pada evaluasi program perencanaan strategis ekowisata di kota Ternate.

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data utama adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber, kegiatan observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian program kegiatan perencanaan strategis belum sepenuhnya dikelola dengan baik, minimnya kualitas sarana dan prasarana serta masih rendahnya tingkat pengawasan berdampak pada timbulnya permasalahan lingkungan di kawasan objek wisata kota Ternate maka, model pengembangan pariwisata alam atau ekowisata harus mengikuti paradigma perkembangan yang berorientasi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan dan dukungan masyarakat dalam kegiatan ekowisata.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya jualah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Evaluasi Program Ekowisata Kota Ternate” ini sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan tesis ini merupakan Tugas Akhir Program Magister atau TAPM Universitas Terbuka Jakarta dengan Unit Pembelajaran Jarak Jauh – UPBJJ Ternate periode tahun 2007-2. Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil tema penelitian yang berfokus pada Evaluasi Program is Ekowisata Kota Ternate Maluku Utara dengan menerapkan teori-teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

Terkait dengan penelitian ini, penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik moril dan materil, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan bagi semua pihak terutama kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Tian Belawati, Med, Ph.D. yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk memperoleh pendidikan tinggi khususnya pada program pascasarjana Magister Administrasi Publik.
2. Direktur PPs, Prof, Suciati, Ph.D dan Ketua Bidang ISIP – UT, Ibu Susanti, M.Si atas terselenggaranya program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJ Ternate sehingga penulis dapat

memperoleh pendidikan dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.

3. Kepala UPBJ – UT Ternate, Bapak Ir. Mulyadi, M.Si beserta seluruh staf pengelolah UPBJ pascasarjana magister administrasi publik atas perhatian dan dukungan dalam bimbingan belajar di Universitas Terbuka Ternate.
4. Bapak Pembimbing Dr. Anwar Hasjim, Drs. Msi dan Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si yang telah memberikan dukungan, petunjuk, bimbingan serta perhatian dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak kepala dinas Rivai Umar dan Hasni Syamsudin selaku sekretaris beserta seluruh staf Dinas Pariwisata kota Ternate yang ikut membantu dan memberikan informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sulaiman R. dan Ibunda tersayang Halima L. Karena atas dukungan, restunya dan Doa-doanya sehingga penulis mampu mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka UPBJJ – Ternate serta rekan-rekan seangkatan Ibu Sania, Fitria, Ahmad Hadi, Hi Bahar Haji, Salim Kamaludin dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tiada kata yang patut dipersembahkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan namun keberadaan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, dan terutama sebagai bahan masukan bagi Dinas Pariwisata Kota Ternate.

Ternate, 9 November 2010

Penulis

Nurdina

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
1. Defenisi Evaluasi	8
2. Defenisi Program	21
3. Perbedaan Program (<i>Process</i>) dan Proyek.....	24
4. Defenisi Ekowisata.....	31
B. Kerangka Pikir	46
C. Defenisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	49
B. Populasi Dan Sampel	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Prosedur Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	54

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1.	Kondisi Geografis Daerah Penelitian	55
2.	Penduduk	57
3.	Aksesibilitas.....	58
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana Pelengkap.....	61
5.	Profil Objek Wisata Kota Ternate	66
6.	Karakteristik Responden	71
7.	Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Sektor Pariwisata.....	72
B.	Pembahasan	75
1.	Evaluasi Program Ekowisata di Kota Ternate	77
2.	Faktor-Faktor Penghambat Realisasi Program Ekowisata di kota Ternate	97
BAB V	Kesimpulan Dan Saran	
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. 2.1. Segitiga Kesuksesan Proyek	30
2. 4.1. Peta Kepulauan Maluku Utara Ternate	56
3. 4.2. Gazebo (rumah panggung wisata)	83
4. 4.3. Perahu Kora-kora	84
5. 4.4. Kualitas sarana penunjang (Panggung Wisata)	87
6. 4.5. Pelaku Industri Kecil Masyarakat Pada Kawasan Pantai Sulamadaha	88
7. 4.6. Kualitas Lingkungan Pembangunan Objek Wisata	89

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	4.1 Wilayah Kecamatan Pulau Ternate	57
2	4.2 Objek Wisata Alam Dan Pantai	66
3	4.3 Objek Wisata Sejarah	67
4	4.4 Obyek Wisata Budaya dan Sejarah	68
5	4.5 Rekapitulasi Objek Wisata Pantai Sulamadaha Tahun 2009	70
6	4.6 Rencana Program Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Ternate tahun 2006-2010	77
7	4.7 Hasil Perhitungan Kunjungan WNI – WNA Tahun 2003 hingga 2008 Dinas Pariwisata Kota Ternate	93

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Surat Pengantar Penelitian
- 2 Pedoman Wawancara
- 3 Rencana Program Perencanaan Strategis Dinas Periwisata
Kota Ternate Tahun 2006 – 2010
- 4 Biodata

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu jenis industri yang dapat menghasilkan pertumbuhan pembangunan dari tahun ke tahun sebagai suatu aktivitas ekonomi dunia yang telah mampu membawa perubahan cukup signifikan di setiap negara. Industri pariwisata dalam negeri yang potensial memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan daerah sebab pendapatan daerah di sektor memberikan pengaruh tersendiri sebagai motivator berkembang dan tumbuhnya sebagian besar jenis industri dan usaha-usaha kerakyatan di daerah. Melalui sektor kepariwisataan, pembangunan dapat di arahkan dan terfokus pada titik-titik potensial daerah dan sekaligus lebih merata di semua lapisan masyarakat. Menurut pendapat Nuryanti (1999:1) menjelaskan bahwa: "Kekayaan sumber daya pariwisata yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk tumbuh dan berkembang sebagai daerah tujuan wisata penting dunia".

Pembangunan kepariwisataan daerah adalah bertumpuh pada sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sebagai penentu dalam kemajuan pembangunan meskipun di tengah krisis multidimensial yang kini melanda. Kebijakan-kebijakan pembangunan kepariwisataan diupayakan untuk mendayagunakan setiap potensi obyek wisata yang bermutu serta dapat

diandalkan untuk pembangunan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, budaya, kesenian, serta warisan kedaerahan yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004 disebutkan bahwa:

“Pengembangan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat; mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan dan antara usaha-usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar dapat saling menunjang”.

Keberhasilan dalam pembangunan pariwisata dapat berimplikasi terhadap penentu keberhasilan pembangunan sektor riil lainnya, sebab sektor pariwisata mampu menjangkau setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat serta berperan aktif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya upaya penanganan yang tepat terhadap industri pariwisata khususnya dalam merumuskan program-program kegiatan pembangunan yang berkualitas, maka hal ini tentunya dapat berpengaruh bagi keberlangsungannya kepariwisataan daerah yang sesuai dengan komitmen visi, misi pembangunan daerah.

Pembangunan industri pariwisata daerah khususnya di kota Ternate yang dicanangkan sebagai kota Wisata, Budaya dan Perdagangan karena didasarkan pada potensi pariwisata yang beragam. Namun berdasarkan dari data penelitian di beberapa wilayah objek wisata kota Ternate kini belum mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik sehingga kualitas objek wisata masih terbengkalai dengan kondisi fisik sarana dan prasarana yang rusak. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap menurunnya minat wisatawan ke daerah tujuan objek wisata disamping itu konflik horizontal Sana pada beberapa waktu lalu berimplikasi terhadap kondisi keamanan daerah sehingga mengalami penurunan wisatawan mancanegara yang cukup signifikan.

Menurut pendapat Hutagalung, (1998:3) “meskipun dalam kurun waktu beberapa tahun ini kondisi kepariwisataan Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi bukan berarti terpuruk oleh keadaan. Memang besar potensi alam dan budaya Indonesia, hanya karena faktor politik dan keamanan akhir-akhir ini yang membuat Indonesia terpuruk di dalam pengembangan sektor pariwisatanya”.

Penanganan terhadap permasalahan wisata daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berlandaskan pada rumusan visi, misi kota Ternate sebagai berikut:

1. Visi : "Menjadikan Ternate sebagai kota budaya menuju masyarakat madani".
2. Misi : "Mewujudkan kota Ternate sebagai kota budaya, kota pariwisata dan perdagangan dan kota pantai.

Penerapan kebijakan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan program-program kegiatan perencanaan strategis dinas Pariwisata Kota Ternate tahun 2006 – 2010 adalah berkaitan dengan pengembangan objek wisata daerah di beberapa kawasan, diantaranya meliputi objek wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Keragaman potensi wisata di kota Ternate khususnya pada kawasan wisata alam, objek wisata pantai Sulamadaha menjadi *icon* wisata yang menarik banyak pengunjung dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Keeksotisan daya tarik wisata alam pantai Sulamadaha yang diminati menjadi tonggak baru terciptanya kepariwisataan daerah sekaligus perannya dalam upaya pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah terutama yang tertuang didalam rumusan perencanaan strategis diharapkan mampu mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan pembangunan diberbagai bidang. Namun, kebijakan dalam bentuk program-program kegiatan pembangunan berbasis ekowisata yang ditempuh sejauh ini masih belum menunjukkan hasil perubahan optimal yang menjanjikan sebab dari hasil pengamatan di lokasi wisata ditemukan kerusakan dari sekian banyaknya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan, selain itu minimnya pengawasan

terhadap lingkungan ekosistem dan penataan zonanisasi lahan wisata yang terkesan belum teratur, menunjukkan kepekaan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan potensial obyek wisata ini belum optimal. Keterpurukan keadaan wilayah ini memberikan dampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan daerah ditengah persaingan destinasi wisata yang semakin mendesak dan maju. Prospek pembangunan ke depan sudah tentu dapat terealisasi dengan baik jika kajian perencanaan pengembangan yang tepat sasaran serta evaluasi pemantapan kinerja implementasi kegiatan seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil kajian objek wisata alam pada kawasan wisata pantai Sulamadaha diyakini bahwa sejauh ini implementasi program kegiatan belum berjalan secara maksimal dalam upaya peningkatan potensi kualitas, kelayakan, serta mutu sarana dan prasarana penunjang pada destinasi wisata. Evaluasi ketercapaian sasaran strategis pada program kerja dapat dipantau ukuran keberhasilan yang dicapai ataupun kegagalan sebagai dampak dari setiap program kegiatan. Peran evaluasi sangat menentukan keberhasilan dan kelangsungan pembangunan industri pariwisata kedepan sesuai dengan tujuan dan sasaran visi, misi daerah dapat diwujudkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi program pembangunan kawasan ekowisata di kota Ternate ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat realisasi program ekowisata dalam meningkatkan kualitas objek wisata di kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui evaluasi program pembangunan kawasan ekowisata di kota Ternate.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menghambat realisasi program ekowisata dalam meningkatkan kualitas objek wisata di kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan untuk lebih memperdalam pengetahuan terhadap upaya perlindungan ekowisata beserta evaluasi terhadap program pembangunan ekowisata sehingga dapat memberikan sumbangsih informasi dan pengetahuan bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku-pelaku pembangunan khususnya dalam merencanakan program atau pun kegiatan sesuai dengan konsep serta prinsip-prinsip pembangunan ekowisata.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Defenisi Evaluasi

Pembangunan pariwisata alam (ekowisata) pada dasarnya bersumber dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Undang - undang lainnya yang telah mendapatkan persetujuan DPR-RI di gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. Setelah adanya otonomisasi daerah melalui Undang-Undang nomor 32 dan nomor 34 tahun 2004 maka sebagian besar kewenangan, tanggung jawab pembangunan daerah di berikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat.

Istilah pembangunan saat ini tidak berbeda dengan konsep pembangunan masa lalu karena masih berkecimpun dalam pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Hasil pembangunan di jabarkan dalam sektor program dan proyek maka senantiasa akan dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja tersebut melalui tahapan evaluasi pencapaian pelaksanaan

program serta hasil – hasil yang di tampilkan ke dalam bentuk proses, produk, maupun jasa.

Konsep evaluasi sendiri menurut beberapa defenisi para ahli di antara lain, Echols dan Shadily, (2000 : 220), istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tanpa evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Menurut pendapat Yunanda (2009:23) dalam Janko Jovanovic (2009) “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”. Sementara pengertian Tague-Sutcliffe (1996 : 1-3) dalam Ishak (3 : 2001), mengartikan evaluasi sebagai *"a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils"*. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut pendapat Willian N. Dunn (1999) (dalam Nugroho 2002:536) menjelaskan bahwa “istilah evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*asessment*)”. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang falid mengenai kiinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Howlet dan Ramesh (1995) (dalam Nugroho 542:2002) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu:

1. Evaluasi Adminsitratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif - anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan :
 - a. *Effort evaluattion*, yang menilai keluaran dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effecttviness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
 - d. *Effectency evaluattion*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
 - e. *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi Judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi Politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi kinerja program merupakan kegiatan yang lebih lanjut sebagai suatu penilaian kinerja dan pengembangan indikator kinerja berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja menjadi suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan potensi dimasa mendatang. Menurut Arikunto (1999: 290) "Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program". Husnul Khotimah Thardan di 08.45 (2010) sumber:<http://tyaeducationjournals.blogspot.com/2008/04/desain>.

Evaluasi program merupakan suatu penilaian terhadap kinerja sebagaimana di ketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap kinerja

(*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena dengan adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Menurut Bambang Wahyudi (2002 : 101) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis terhadap prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.

UNIVERSITAS TERBUKA

Penilaian prestasi kerja menurut Utomo, Tri Widodo adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. ([http://www .geocities. com/ mas_tri/sistem DP3.df](http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.df)). Defenisi selanjutnya menurut pendapat (Schuler & Jackson, 1996:3). Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Terdapat tiga dimensi kinerja yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja, yaitu:

1. Tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi, yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja.

2. Tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan Kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan.
3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. <http://shelmi.wordpress.com/2009/02/27/evaluasi-kinerja/>.

Suatu evaluasi kinerja sangat penting dilakukan untuk mampu menciptakan suatu gambaran yang tepat mengenai efektifitas kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja tersebut tidak hanya di tujukan untuk penilaian serta perbaikan proses suatu kinerja yang buruk tetapi juga ditujukan sebagai motivasi pegawai dalam upaya meningkatkan prestasi ke arah yang lebih baik lagi. Dengan standar pengukuran melalui suatu analisa data hasil pengukuran kinerja melalui proses yang terdiri dari :

1. *Identifikasi*, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan.
2. *Pengukuran*, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau membandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas.
3. *Manajemen*, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Meja dkk (2004:222-223).

Standar pengukuran kinerja melalui evaluasi program menjadi sumber dasar bagi organisasi dalam membentuk kualitas kinerja yang diperhitungkan bagi keberlangsungannya roda organisasi. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui seberapa jauh tingkat pencapaian hasil, kemajuan ataupun kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13) dalam Khusnul (4 : 2008), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford (2000 ; 30) dalam khusnul (5 :2008), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan, membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Tujuan penilaian sangat penting artinya dalam peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti mengidentifikasi kebutuhan program organisasi dan berbagai aspek lain dari proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Untuk itu standar sebuah evaluasi harus berdasarkan pada standar evaluasi sebagaimana pendapat Umar (2002:40) dalam menjelaskan “ Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu :

1. *Utility* (manfaat)
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. *Accuracy* (akurat)
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. *Feasibility* (layak)
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengetahui pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program atau kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam melakukan evaluasi kinerja yaitu :

1. Pendekatan pertama adalah *objective-oriented approach*. Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan *three-dimensional cube* atau *Hammond's evaluation approach*. Pendekatan Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu *instruction* (karakteristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), *institution* (karakteristik individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi) dan *behavioral objective* (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan *taksonomi Bloom*, meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor)
3. Pendekatan ketiga adalah *management-oriented approach*. Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: *context-input proses-product*). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu ditingkatkan.
4. Pendekatan keempat adalah *goal-free evaluation*. Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal.
5. Pendekatan kelima adalah *consumer-oriented approach*. Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti software, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunaannya, atau apakah

diperlukan dan penting untuk program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang dievaluasi di-*follow-up dan cost effective*.

6. Pendekatan keenam adalah *expertise-oriented approach*. Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu program atau proyek, karena itu disebut *subjective professional judgement*.
7. Pendekatan ketujuh adalah *adversary-oriented approach*. Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argumen evaluator mana yang diterima. Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang.
8. Pendekatan terakhir adalah *naturalistic & participatory approach*. Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai (Salehudin,2009:5-7).

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan tugas dan tanggung jawab dari kepemimpinan seorang pemimpin sebuah instansi dalam melaksanakan pengembanan visi dan misi serta sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Dengan berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan dalam akuntabilitas kinerja dengan substansinya, maka perlu akuntabilitas akan mencerminkan akuntabilitas kebijakan, program,

manajemen, proses dan ketaatan. Ruang lingkup atau tingkatan evaluasi yang akan di lakukan meliputi : (a) Evaluasi Kinerja Kegiatan; (b) Evaluasi Kinerja Program; dan (c) Evaluasi Kinerja Kebijakan.

a. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauhmana kesesuaian antara program dan kegiatannya sesuai dengan atribut indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) yang telah di tetapkan di dalam rencana strategis.

b. Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program, sebagaimana diketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegiatan. Langkah-langkah yang harus di tempuh dalam evaluasi kinerja program merupakan kelanjutan dari capaian kinerja kegiatan.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan di tetapkan oleh yang berwenang untuk di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Evaluasi dan analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan awal (bukan akhir) dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dengan demikian analisis kebijakan merupakan pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian yang kritis mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu kebijakan yang bermutu sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya.

2. Defenisi Program

Program kerja akan menjadi suatu kebutuhan primer bagi suatu organisasi karena organisasi tanpa memiliki suatu program kerja yang terarah dan terpadu. Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah di tentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi. Peran pemerintah daerah selaku pemegang otoritas diharapkan dapat mengendalikan isu publik, dan permasalahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan administratif berupa pernyataan-pernyataan umum tujuan, sasaran, dapat di implementasikan perlu dijabarkan terlebih dahulu kedalam bentuk program-program yang bersifat operasional.

Program-program yang sifatnya operasional merupakan program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin di capai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus di tempuh, dan kejelasan standar yang harus di pedomani.

Program merupakan rencana langkah - langkah strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategi. Program harus jelas sasaran, rational, deskripsi, tahapan, kebutuhan dana, dan hasil keuangannya. Program digunakan untuk membuktikan melalui perencanaan kemampuan organisasi dalam mewujudkan target pencapaian sasaran strategi. Sehubungan dengan program ini, Terry (Tachjan 2008:31) mengemukakan bahwa.

"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets".

Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget. Pendapat tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1985 : 85) bahwa program tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Sasaran yang hendak dicapai,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.

Untuk mengukur kualitas program dapat dilakukan dari aspek struktur dan aspek isinya (*content*). Struktur program menggambarkan struktur permasalahan yang akan di pecahkan, sedangkan isi program menggambarkan volume (bobot) pekerjaan dan sumber dayanya. Menurut Azis Dwi Alfian (2009:1) menjelaskan sifat program kerja adalah sebagai berikut:

1. Program kerja yang bersifat terus menerus (*continue*)
Program kerja seperti ini akan di lakukan secara terus menerus (tidak hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali melaksanakan jenis program kerja ini.
2. Program kerja yang bersifat *insidental*
Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu oleh suatu organisasi biasanya mengambil momentum momentum waktu yang penting
3. Program kerja yang bersifat *tentatif*
Program kerja ini sifatnya akan di lakukan sesuai dengan kondisi yang akan datang. Alasan di buatnya program kerja jenis ini adalah karena kurang terjaminnya faktor-faktor pendukung ketika di adakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain.

Sebuah program kerja dilaksanakan dengan menentukan periode penilaian dan waktu penilaian. Lazimnya periode penilaian adalah satu tahun, sedangkan waktu penilaian dapat dilakukan satu kali setahun atau satu semester sekali.

1. Program Kerja Jangka Panjang

Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. Program kerja model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan dalam waktu yang pendek tidak memungkinkan.

2. Program Kerja Jangka Pendek

Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara 1-3 tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini, dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat.

3. Perbedaan Program (*Process*) dan Proyek

Program mempunyai sifat yang sama dengan proyek. Perbedaannya terletak pada kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber daya yang diperlukan, program memiliki skala yang lebih besar dari pada proyek dan program dapat dibagi menjadi bermacam proyek berbeda. Kesamaannya yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia, melalui sederetan proses perencanaan, pengolahan dan pengendalian yang sistematis sementara perbedaannya dapat dilihat dari sifat maupun karakteristik yang terdapat dalam rangkaian aktivitas

sebuah lingkup organisasi, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu aktivitas operasional (*program/process*) dan aktivitas proyek (*project*). Jika di lihat dari karakteristik pada kedua aktivitas diatas, maka dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbedaan Antara Program dan Proyek

Karakteristik Aktivitas	Program/ Operasional	Proyek
Sifat kegiatan	Pasif dan rutin	Dinamis dan non rutin
Siklus kegiatan	Relatif panjang	Relatif pendek
Intensitas kegiatan	Relatif sama (tetap)	Berubah – ubah
Landasan kegiatan	Anggaran dan penjadualan tidak tajam	Semua kegiatan didasarkan anggaran dan penjadualan
Komponen kegiatan	Jenis aktivitas relatif sedikit	Jenis aktivitas relatif banyak dengan berbagai ilmu
Kebutuhan Sumberdaya	Relatif konstan (macam maupun volumenya)	Berubah – ubah (macam maupun volumenya)

Aktivitas operasional (*program/process*) merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang sepanjang waktu artinya bersifat kontinyu (terus menerus) dengan skala aktivitas lebih luas dan penggunaan sumber daya yang besar sehingga aktivitas operasional ini merupakan kumpulan bermacam – macam proyek, sementara aktivitas proyek merupakan aktivitas yang unik dan berlangsung dalam batas waktu tertentu artinya bersifat sementara dalam jangka waktu terbatas dengan sumber daya tertentu serta memiliki sasaran yang jelas. (*Project Management Body of Knowledge, (PMBOK) Muhammad Taufiq (2006).*

Secara umum ciri- ciri proyek dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok:

1. Proyek mempunyai tujuan yaitu menghasilkan barang dan jasa;
2. Proyek memerlukan input berupa faktor-faktor produksi atau sumber daya, seperti modal, tanah dan material, peralatan, tenaga pegawai dan kepemimpinan;
3. Proyek mempunyai titik awal dan titik akhir; dalam waktu tertentu setelah proyek selesai, mulai dapat menghasilkan.

Proyek adalah suatu pekerjaan atau tugas bersama para penyelenggara proyek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa melalui kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborong), yang telah ditetapkan target mutu dan biaya serta tertentu waktu mulai dan selesainya. Proyek mempunyai tujuan atau ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan secara jelas, berdasarkan persyaratan teknis dan administrasi yang sudah disiapkan. Biasanya proyek dilaksanakan

oleh suatu organisasi penyelenggara proyek yang sifatnya sementara dan akan dibubarkan setelah proyek selesai. Menurut kebutuhan investasi, proyek dibagi dalam 3 (tiga) jenis:

1. Proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa (Contoh : bendungan, jalan, kelistrikan/energi (PLTA,PLTD,PLTU), dan lain).
2. Proyek yang dibangun dengan tujuan menghasilkan keluaran berupa faktor-faktor produksi non-fisik. (Contoh: proyek pendidikan/ pelatihan dan pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan).
3. Proyek yang dibangun untuk menciptakan penemuan-penemuan baru (Contoh : proyek-proyek penelitian teknologi).

Sedangkan tugas/pekerjaan yang bukan merupakan proyek adalah:

- Proses tuntutan asuransi, pemesanan, atau pembayaran;
- Proses produksi pabrik;
- Mengendarai truck pengangkut kiriman dengan jalur tetap setiap hari; atau, semua hal yang merupakan pengulangan kegiatan.
<http://pukebramantio.blogspot.com/.html>

Proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu (<http://pukebramantio.blogspot.com/2010/03/definisi-ciri-dan-jenis-proyek.html>). Pendefinisian dari proyek sendiri mempunyai pengertian yang bervariasi, namun pada esensi (inti) nya tidak berbeda, diantaranya:

1. Proyek diartikan sebagai sederetan urutan aktifitas yang diselesaikan tepat pada waktu, sesuai sasaran dan berdasarkan spesifikasi yang terstandarisasi (Jeffery L.W.)
2. Proyek didefinisikan pula sebagai kumpulan aktivitas untuk memenuhi atau membentuk suatu obyek yang diinginkan, yang mana kegiatannya bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu, memerlukan sumber daya tertentu dan memiliki sasaran yang jelas.
3. Proyek merupakan urutan (sementara) dari aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi pada satu tujuan atau sasaran dan dilengkapi dengan waktu yang spesifik, berdasarkan anggaran, dan spesifikasi (R.K. Wysocki, R. Beck, dan David BC).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, suatu proyek pembangunan daerah dilaksanakan pada tingkat kabupaten atau kota sebagai unit terendah dalam hirarki pembangunan. Proyek terkait dengan jenisnya dan dananya. Setelah jenis dan dananya disediakan maka tahap berikutnya adalah menetapkan di bagian mana dari daerah kabupaten atau kota proyek tersebut akan dilaksanakan. Ada beberapa cara untuk menetapkan proyek pembangunan. Cara penetapan proyek biasanya dilakukan, pada tahap awal, melalui suatu kajian akademis antara lain berdasarkan pendekatan geografi, pendekatan ekonomi dan lainnya. Pada tahapan pendekatan geografi dilakukan

melalui tahapan penetapan masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pengwilayahan, korelasi serta analogi. Oleh karena terdapatnya keragaman berbagai masalah yang di hadapi masyarakat, berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah dan skala waktu pelaksanaan maka disusun skala prioritas proyek.

Kelemahan dalam penetapan proyek pembangunan di hadapkan pada faktor politis pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota utamanya pada era otonomi daerah saat ini, faktor ketersediaan dana dan bidang tanah tempat di laksanakan proyek tersebut. Kesuksesan dari sebuah proyek secara spesifik sangat di tentukan dalam pengelolaan empat unsur utama yaitu *Scope*, *Time*, *Quality* dan *Cost* yang dapat digambarkan dalam “Segitiga Kesuksesan Proyek”, dan keempat unsur tersebut satu sama lain saling terkait (terpengaruh) atau saling berbanding lurus artinya besar kecilnya batas wilayah proyek akan mempengaruhi lama tidaknya waktu pekerjaan proyek, besar kecilnya biaya proyek dan menentukan kualitas tidaknya suatu produk hasil pekerjaan proyek. (Muhammad Taufiq. *Project Management Body of Knowledge (pmbok)* 2006) dalam Makalahnya menjelaskan Tolok ukur kesuksesan proyek dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Segitiga Kesuksesan Proyek



1. *Scope* (batas wilayah / ruang lingkup) pekerjaan proyek, dapat memahami batasan wilayah pekerjaan proyek yang akan di kerjakan dari analisis permasalahan, analisis kelemahan, analisis kebutuhan maupun analisis kelayakan dari sistem yang akan dibangun atau di kembangkan
2. *Time* (waktu) pekerjaan proyek, dapat memenuhi batas waktu dari penjadualan proyek yang telah di sepakati dalam dokumen perencanaan dari kontrak pekerjaan yang bersangkutan, bisa menggunakan Gantt Chart, PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) atau CPM (*Critical Path Method*),
3. *Quality* (Kualitas) proses pekerjaan atau hasil akhir pekerjaan (produk) proyek dapat memenuhi batasan standar tertentu yang di sepakati melalui perencanaan.
4. *Cost* (Biaya) pelaksanaan proyek dapat memenuhi batas anggaran yang telah direncanakan atau yang telah di sepakati berdasarkan perhitungan atau penilaian investasi yang di tanamkan dengan menggunakan *Payback Period*.

4. Defenisi Ekowisata

Definisi ekoturisme pertama kali diperkenalkan oleh Hector Ceballos dan Lascurain (1987) dan kemudian disempurnakan oleh The Ecotourism Society (1993) (dalam Yusran 2001:5) dengan mendefinisikan ekoturisme sebagai suatu perjalanan bertanggungjawab ke lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ekoturisme sesungguhnya adalah suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan lingkungan, ekonomi dan sosial.

Sedangkan di Indonesia pembicaraan mengenai ekoturisme mulai ramai sejak tahun 1990, setelah WALHI mengundang Kreg Lindberg pakar dari Amerika Serikat (Anggota TES) berbicara tentang "parawisata sebagai upaya pelestarian lingkungan, yang disebut sebagai ekoturisme". Sejak saat itu LSM – LSM mulai ramai memperbincangkan tentang ekoturisme. Kemudian Pada tahun 1995 Lembaga Studi Pariwisata Indonesia, Conservation International Indonesian Program dan Yayasan Bina Swadaya membentuk sebuah konsorsium jaringan kerja yang disebut "Indonesia Ecotourism Network (INDECON)" yang bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan ekoturisme melalui berbagai bentuk kegiatan, baik bersifat advokatif, penyebaran informasi, pelatihan dan kegiatan lainnya.

Pembangunan ekowisata berdasar pada peraturan perundang-undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang diperuntukkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Lebih lanjut dalam pasal 31 undang-undang No 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pendidikan menunjang budi daya dan wisata alam. ekowisata atau wisata alam diartikan sebagai pariwisata yang pendekatannya lebih kepada aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam, atau taman nasional sebagai daya tarik wisatawan. Ekowisata atau disebut sebagai *ekoturisme*, *wisata ekologi*, *ecotourism*, *eco-tourism*, *eco tourism*, *eco tour*, dan *eco-tour*.

Istilah “*ekowisata*” dapat diartikan juga sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu: 1) keberlangsungan alam atau ekologi, 2) memberikan manfaat ekonomi, dan 3) secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Definisi ekowisata oleh *The International Ecotourism Society (TIES)* pada awal tahun 1990 yaitu sebagai berikut.

"Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people."(Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat).

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendefinisikan ekowisata sebagai : "Wisata dalam bentuk perjalanan ke tempat-tempat di alam terbuka yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan tumbuhan serta satwa liarnya (termasuk potensi kawasan ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa liar) juga semua manifestasi kebudayaan yang ada (termasuk tatanan lingkungan sosial budaya) baik dari masa lampau maupun masa kini di tempat-tempat tersebut dengan tujuan untuk melestasikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat".

Kemudian oleh *Green Tourism Association* (dalam Oka. A Yoeti, 2004:30) mendefinisikan *ecotourist* sebagai suatu pembangunan yang memiliki empat pilar atau atribut yaitu sebagai berikut.

- 1) *Environmental responsibility*; mengandung pengertian proteksi, konsenasi, atau perluasan sumber daya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlangsungan ekosistem.
- 2) *Local economic aitality*; mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*).
- 3) *Cultural sensitivity*; mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi (penghargaan) terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal yang baik.

- 4) *Experiential richness*; menciptakan atraksi yang memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang lebih memuaskan, melalui partisipasi aktif dalam memahami personal dan keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan atau budaya.

Dari pemaparan defenisi tersebut di atas maka pengertian ekowisata dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan sebuah aktifitas perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap daerah alami atau daerah yang telah selaras dengan kaidah alam. Dimana tujuan dari wisatawan tersebut menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam seperti menikmati keindahan alam, pengetahuan, pemahaman dan mendukung upaya konservasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di kawasan wisata alam.

Pengembangan suatu kawasan menjadi tujuan ekowisata memerlukan perencanaan yang matang, waktu yang cukup lama serta upaya kerja keras agar tujuan ekowisata dapat terpenuhi. Kegiatan ekowisata yang tidak terencana dengan baik akan mempunyai resiko yang besar, bukan saja mengakibatkan kegagalan tetapi yang lebih berbahaya adalah dampak negatif yang di timbulkannya justru lebih besar dari pada dampak positifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, maka sejak awal mulai proses perencanaan, penerapan, dan pengelolaannya harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Secara strategik, daya dukung

(*carrying capacity*) harus menjadi ukuran baku dalam mengukur jumlah pengunjung, jenis kegiatan dan waktu kunjungan serta pembangunan fasilitas wisata. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 18 di jelaskan bahwa pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk di jadikan sasaran wisata. Sementara pada Bab III Pasal 6 pion (a) di sebutkan bahwa:

Pembangunan objek dan daya tarik wisata di lakukan dengan memperhatikan:

1. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Kelestarian mutu lingkungan hidup.
4. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Masyarakat ekowisata internasional mengartikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (*responsible travel natural areas that conserves the environtment and improves the well-being of local people*). Dari defenisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni *pertama*, ekowisata sebagai produk; *kedua*, ekowisata sebagai pasar; ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian

lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata secara ramah lingkungan. (Hakim L. 2004. Dasar-Dasar Ekowisata, Malang. Bayumedia Publishing Sudarto G.1999.Ekowisata.)

Baik dari defenisi maupun defenisi-defenisi ekowisata mempunyai implikasi langsung pada wisatawan dan penyedia jasa wisata. Sejalan dengan hal itu penyedia jasa juga dituntut untuk mampu menyediakan produk-produk yang ramah lingkungan dalam hal pengembangan atraksi wisata, misalnya, lokasinya dekat dengan alam, model pengembangannya serasi dengan lingkungan, layanan yang ramah lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah harus memberdayakan masyarakat lokal secara sosial, ekonomi dan budaya. Langkah awal dalam proses pengembangan kawasan wisata alam adalah dengan penentuan ide ataupun gagasan atas kelayakan suatu kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata. study kelayakan (*fesibility study*) yang merupakan kajian bersifat praktis atas berbagai keunggulan dan kelemahan sumber daya yang tersedia, yang akan dijadikan basis penyusunan rencana proyek.

Study kelayakan akan membantuu perencana melihat dan memahami kondisi-kondisi minimal yang dibutuhkan untuk merencanakan suatu proyek dan untuk mengetahui gambaran awal tentang sejauh mana proyek tersebut kelak dapat memberikan hasil yang optimal. (Damanik. 2006:53). Dengan tinjauan study kelayakan wisata alam memungkinkan pihak penyusun

perencanaan proyek dapat menganalisis apakah sebuah proyek dapat menguntungkan secara ekonomi (*cost and benefit*) layak secara tehnik dan berjalan dengan baik ataukah tidak, biasanya study kelayakan dilakukan untuk maksud sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kondisi nyata suatu produk atau layanan
2. Mengevaluasi peluang pengembangan produk dan jasa
3. Mengevaluasi peluang penciptaan produk dan jasa baru
4. Mengidentifikasi penyandang dana yang potensial bagi proyek. (Warnell,1986 dalam Janianton dan Damanik 2006).

Hal tersebut sangat diperlukan dalam menentukan apakah suatu proyek layak untuk didanai dan apabila hasil yang diharapkan memberikan dampak positif maka tahapan selanjutnya adalah dengan pengembangan produk yang diinginkan oleh pasar (wisatawan). Secara lebih khusus study kelayakan pada perencanaan ekowisata dimaksudkan untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan berikut:

1. Apakah gagasan (rencana proyek ekowisata) tersebut realistis? Realistis tidaknya ide tersebut hanya dapat dibuktikan melalui suatu kajian yang menyeluruh dan seksama. Memaksakan suatu proyek yang secara tehniks mudah namun secara non-tehniks sangat rumit demi untuk simbol “pembangunan” sangat beresiko. Hal ini sangat dipedomani agar tidak terjadi pemborosan energi, sumberdaya, dan dana, kelak setelah proyek berjalan.
2. Apakah tersedia potensi ekowisata dan memadai untuk dikembangkan ? di sini kriteria potensi (*potentialities*) dan eksistensi (*existing*) atraksi ekowisata perlu dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan kriteria tersebut kemudian dapat diidentifikasi mana yang eksis dan mana yang masih berupa potensi.

3. Apakah ada segmen pasar untuk produk wisata itu? Study kelayakan harus mampu menjawab pertanyaan ini sebab hal itu akan menjadi patokan yang menentukan apakah proyek layak dilakukan atau tidak. Di dalam study perlu digambarkan kondisi pasar ekowisatawan yang sudah ada (*existing market*), setidaknya di kawasan-kawasan terdekat dengan lokasi (*rencana*) proyek.
4. Apakah besaran investasi untuk pengembangan produk lebih tinggi daripada keuntungan yang akan diperoleh? analisis biaya dan keuntungan (*cost-benefit analysis*) menjadi keharusan untuk merekomendasikan dapat tidaknya proyek dilaksanakan. Analisis ini relatif rumit karena mencakup banyak komponen dan pertimbangan perbandingan harga dasar dan harga yang berlaku.
5. Apakah proyek tersebut mampu mendorong atau fungsional bagi pariwisata berkelanjutan? Kelayakan suatu proyek juga sangat ditentukan oleh keberlanjutan proyek tersebut. meskipun sudah memenuhi kriteria kepraktisan, ketersediaan atraksi yang memikat, ketersediaan segmen pasar, dan secara ekonomi *profitable* namun jika proyek ekowisata itu hanya berjangka pendek maka harus dihentikan karena resiko dan konsekuensi jangka panjangnya sangat besar. (Damanik : 2006:56).

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelas kiranya bahwa konsep study kelayakan merupakan sebuah analisis terhadap kegiatan-kegiatan ekowisata secara mendalam membantu perencana untuk menghasilkan suatu proyek yang layak untuk dijalankan tidak hanya dalam konteks perencanaan produk tetapi juga meliputi pemasaran produk itu sendiri. Pengalaman para ahli (antara lain Neal dan Trocke, 2002; Boo, 1993), study kelayakan ekowisata sebaiknya menyangkut paling tidak delapan kegiatan sebagai berikut :

1. Menganalisis situasi lokasi wisata.

Fokus utama studi kelayakan adalah potensi dan atraksi wisata yang berkembang perlu diperhatikan seperti sumberdaya alam, seperti air, hutan, lahan terbuka, flora dan fauna yang beranekaragam dan gabungan semuanya. Semakin lengkap sumber daya ini maka semakin besar peluang pengembangan suatu kawasan ekowisata. Untuk memudahkan analisis sebaiknya lebih dahulu diidentifikasi potensi dan fakta atraksi itu secara spesifik karena akan menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan proyek ekowisata.

2. Mengidentifikasi fasilitas dan infrastruktur yang tersedia

Infrastruktur yang memadai sangat membantu keberhasilan dan kemajuan wisata daerah. Banyak kawasan potensial yang bahkan sama sekali tidak memiliki infrastruktur yang elementer kecuali atraksi alam seperti, keragaman flora dan fauna, keunikan pantai, danau dan lain sebagainya. Fasilitas penting lainnya yang diidentifikasi antara lain mencakup akomodasi, baik yang tersedia maupun yang potensial untuk dikembangkan, selain itu moda transportasi, jarak tempuh ke lokasi, sarana pendukung keunggulan masing-masing fasilitas, dan peluang pengembangan atraksi pendukung dipetakan serinci mungkin termasuk kemudahan-kemudahan ataupun kesulitan-kesulitan pengembangannya.

3. Mengidentifikasi profil wisatawan

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam mengoptimalkan potensi proyek ekowisata daerah adalah upaya untuk memasarkan produk wisata kepada wisatawan. Gambaran pertama tentang pasar yang muncul dalam pelaksana studi adalah wisatawan yang tertarik dengan objek wisata alam (*ecotourist*).

4. Daya-dukung

Daya dukung dalam hal ini adalah jumlah pengunjung dan infrastruktur wisata yang dapat ditampung dalam suatu kawasan tanpa mengurangi mutu biofisik dan obyek daya tarik wisata (bdkn Eagles dan McCool, 2002 dalam Damanik 2006). Arti yang lebih luas adalah kapasitas suatu obyek daya tarik wisata untuk memberikan kepuasan wisata melalui ketersediaan mutu atraksi wisata di suatu kawasan. Oleh sebab itu ada dua unsur penting dalam penilaian daya dukung, yakni: pertama, mutu fisik dan non-fisik atraksi; kedua tingkat kepuasan wisata yang dapat diberikan oleh atraksi yang tersedia misalnya atraksi alam atau buatan yang memang mempunyai nilai tinggi, asli dan otentik. Syarat penting lainnya adalah tanggung jawab industri pariwisata kepada masyarakat setempat dalam bentuk distribusi sebagian keuntungan ekowisata. Semakin kurang sensabilitas sosial dan ekologi kawasan yang dikaji, maka semakin besar peluang untuk melaksanakan proyek ekowisata.

5. Memilih alternatif aktivitas ekowisata yang terbaik

Kegiatan-kegiatan wisata yang akan dikembangkan perlu diseleksi secara ketat. Hal ini kelak akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi objek ekowisata secara menyeluruh dan memperkirakan kegiatan yang masih mungkin dikembangkan untuk menarik wisatawan selanjutnya dipilih beberapa kegiatan yang paling prospektif, *managable*, dan menguntungkan.

6. Mengevaluasi realitas sumberdaya manusia yang tersedia

Evaluasi atas kondisi sumberdaya manusia mungkin akan menghasilkan gambaran sebagai berikut : *Pertama*, kelompok sasaran mempunyai pengalaman dalam pengelolaan ekowisata atau usaha sejenis, pendidikan yang memadai, serta penguasaan bahasa asing. *Kedua*, bisa juga terjadi bahwa kelompok sasaran tidak memiliki persyaratan kualifikasi keahlian yang memadai dan usaha ekonomi yang dikelola masih bersifat subsistem. Kondisi ini mungkin kurang mendukung tetapi perlu dilihat juga kemungkinan peningkatan kualitas ketrampilan melalui pendidikan dan latihan, pengembangan kemitraan dalam pengelolaan usaha melalui cara-cara yang adil. Apabila demikian halnya maka peluang untuk pelaksanaan proyek semakin terbatas. Ketimpangan dan konflik sosial sangat mudah terjadi, namun dapat

dihindari dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk memperluas jangkauan distribusi dan redistribusi hasil proyek ekowisata.

7. Memperkirakan investasi yang dibutuhkan proyek

Setiap proyek selalu mensyaratkan ketersediaan modal. Proyek ekowisata membutuhkan modal yang bergerak maupun modal investasi yang relatif besar. Perkiraan investasi dapat dimulai dengan identifikasi luas lahan atau areal proyek, kemudian pengembangan fisik dan bangunannya. Selanjutnya untuk mengembangkan atraksi atau kegiatan wisata masih diperlukan investasi untuk taman, stasiun pengamatan satwa, sarana akomodasi, angkutan dan lain sebagainya. Semua komponen modal ini harus jelas agar dengan demikian keuntungan dan kerugian yang mungkin diraih oleh proyek dapat diperhitungkan.

8. Memperkirakan pendapatan

Proyek ekowisata dapat dikatakan layak secara ekonomi apabila pendapatan lebih besar dari biaya investasi infrastruktur dan biaya operasional. Sebaliknya perlu dipertimbangkan kembali untuk mengerjakan proyek itu apabila permintaan pasar sangat terbatas dan kurang layak dari sudut manajemen. Perkiraan pendapatan hendaknya mempertimbangkan pemasukan di luar *entry-fee*. Penggunaan alat bantu atau persewaan fasilitas retribusi usaha penunjang ekowisata yang

beroperasi di kawasan proyek juga merupakan sumber penerimaan yang potensial. (Damanik 2006:57-64).

Kedelapan kegiatan di atas merupakan substansi pekerjaan dalam penyusunan studi kelayakan proyek ekowisata. Selain itu konsep ekowisata yang berkembang harus dapat mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekowisata sebagai berikut:

1. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan.
2. Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan, melalui pelaksanaan sistem pemintakan (*zonasi*).
3. Mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah tujuan.
4. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku terhadap lingkungan alam dan budaya.
5. Memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata.
6. Meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan, dan bersifat ramah lingkungan.
7. Menekan tingkat kebocoran pendapatan (*leakage*) serendah-rendahnya.
8. Pengembangan harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan atas dasar musyawarah dan pemufakatan masyarakat setempat.
9. Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan ekowisata.
10. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
11. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata.
12. Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau menolak pengembangan ekowisata.
13. Menginformasikan secara jelas dan benar konsep dan tujuan pengembangan kawasan tersebut kepada masyarakat setempat.

14. Membuka kesempatan untuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (*multi-stakeholders*) dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
15. Memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
16. Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk membuka usaha ekowisata dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif.
17. Memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
18. Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
19. Menekan tingkat kebocoran pendapatan (*leakage*) serendah-rendahnya.
20. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
21. Menetapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata.
22. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak lainnya (*multi-stakeholders*) dalam penyusunan kode etik wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata.
23. Melakukan penelitian dan pengenalan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
24. Memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional.
25. Memperhatikan dan melaksanakan secara konsisten: Dokumen-dokumen Internasional yang mengikat (Agenda 21, Habitat Agenda, Sustainable Tourism, Bali Declaration dsb.). GBHN Pariwisata Berkelanjutan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
26. Menyusun peraturan-peraturan baru yang diperlukan dan memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan lainnya yang telah ada sehingga secara keseluruhan membentuk sistem per-UU-an dan sistem hukum yang konsisten.
27. Memberlakukan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi atas pelanggaran secara konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*law enforcement*).
28. Membentuk kerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku. Copy Right © www.ekowisata.info - All Right Reserved. Contact : webmaster.

Visi ekowisata Indonesia adalah untuk menciptakan pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya), melibatkan dan menguntungkan masyarakat setempat, serta menguntungkan secara komersial. Dengan visi ini Ekowisata memberikan peluang yang sangat besar, untuk mempromosikan pelestarian keaneka-ragaman hayati Indonesia di tingkat internasional, nasional, regional maupun lokal. Kepariwisata akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebagaimana hal ini dengan disejajarkan dengan tujuan ekowisata Indonesia adalah untuk :

1. Mewujudkan penyelenggaraan wisata yang bertanggung jawab, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam, peninggalan sejarah dan budaya;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat;
3. Menjadi model bagi pengembangan pariwisata lainnya, melalui penerapan kaidah-kaidah ekowisata.

B. Kerangka Berpikir

Pembangunan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus menuju kearah kemajuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga halnya dengan pembangunan di bidang pariwisata. Tujuan akhir dari keseluruhan proses pembangunan adalah terciptanya keberlanjutan bagi generasi yang akan datang (Burntland report, 1987). Secara prinsip pembangunan adalah struktur yang terencana dengan baik agar dapat meningkatkan cara hidup masyarakat menjadi lebih baik (Sicroff, et al. 2002). Dari konsep pemikiran tersebut, maka diyakini bahwa keberhasilan dan keberlanjutan ekowisata melibatkan prinsip-prinsip ekowisata poin pertama yakni mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.

Kebijakan peraturan pemerintah daerah berupa perencanaan strategis terkait dengan ekowisata harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan yang nampak dalam kegiatan evaluasi program ekowisata khususnya ekowisata di dinas pariwisata kota Ternate.

C. Definisi dan Konsep Operasional

Guna memudahkan dalam proses pengukuran variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini maka konsep yang telah dirumuskan dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator penelitian berskala ordinal. Adapun konsep dan operasional yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Program

Evaluasi program sangat terkait dengan ketentuan penilaian yang ditetapkan dalam pembangunan daerah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam evaluasi program diarahkan pada penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran yang termasuk dalam perencanaan strategis SKPD dinas pariwisata kota Ternate periode tahun 2006-2011 khususnya dalam program pengembangan objek wisata alam di kawasan wisata daerah yang menjadi *icon* wisata Ternate.

2. Ekowisata

Objek wisata yang bersifat alamiah atau ekowisata merupakan objek wisata yang bersumber pada keadaan lingkungan alam, seperti pemandangan alam, pantai, danau sungai dan sebagainya yang perlu diperhatikan kelestariannya, serta perlindungan ekosistem di kawasan tersebut. Upaya perlindungan kawasan objek wisata alam atau ekowisata dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata pada proses pembangunan dan pengembangan

ekowisata pada kawasan objek wisata pantai Sulamadaha. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

1. Evaluasi program pembangunan ekowisata kawasan daya tarik objek wisata daerah khususnya kawasan pantai Sulamadaha sebagai objek wisata alam (*ekowisata*) kota Ternate.
2. Penerapan program perencanaan strategis dalam bentuk proyek pembangunan membawa dampak terhadap pengembangan terhadap kondisi objek wisata alam.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuai dengan judul tesis “Evaluasi Program Ekowisata di Kota Ternate” maka yang menjadi pokok penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program ekowisata pada dinas pariwisata kota Ternate dengan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang analisis kebijakan Pemda kota Ternate khususnya Dinas Pariwisata kota Ternate perannya dalam evaluasi program kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi (Ambert et al., 21:1995). Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan aquri secara mendalam dengan mencari informasi pada seorang yang dipilih dalam kelompok kecil.

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud hasil penelitian ini akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Metode deskriptif menurut Nawawi (1983:63) bahwa metode “Deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan

keadaan subjek atau objek penelitian berupa seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”.

Peneliti berusaha untuk mengetahui dan memaparkan informasi faktual secara sistematis dan akurat mengenai evaluasi program ekowisata di dinas pariwisata kota Ternate khususnya pada objek wisata alam pantai Sulamadaha. Berdasarkan hal di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1989:12) adalah: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sejalan dengan defenisi tersebut Kirk dan Miller (1986:9) (Syaraffudin, 2007) mendefenisikan bahwa dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri. Penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal argumentatif.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Secara umum populasi berarti keseluruhan objek penelitian yang mencakup semua elemen yang terdapat di wilayah penelitian. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program ekowisata dinas pariwisata kota Ternate.

Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen sebab seluruh pegawai yang diteliti adalah pegawai negeri sipil sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kebijakan implementasi perencanaan strategis di dinas pariwisata kota Ternate. Metode penarikan sampel adalah dengan *purposive sampling*, yakni penarikan sampel berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu tentang apa yang diketahui. Responden yang dijadikan sampel merupakan orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang berjumlah 8 orang.

Mereka adalah informasi kunci (*key person*) yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Sekertaris Dinas Pariwisata kota Ternate beserta beberapa staf seksi khususnya bidang pariwisata alam.
- b. Seksi Pendataan BAPPEDA sebagai pejabat pemerintah yang memahami aktifitas kinerja implementasi program

pembangunan daerah kota Ternate yang memiliki sejumlah data pembangunan setiap instansi pemerintah di kota Ternate.

- c. Perwakilan masyarakat setempat objek wisata alam.
- d. Beberapa turis asing dan lokal.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik responden. Penentuan sample dilakukan penulis bermaksud untuk memperoleh keterangan mengenai masalah penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Selain itu penentuan sampel ini juga untuk memudahkan penafsiran, peramalan dan pengambilan keputusan disamping perkembangan efektifitas dan efisien dari segi waktu maupun biaya.

C. Instrumen Penelitian

Data yang terangkum dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-litaeratur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrument pedoman *rivew* dokumen (*review document*).

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian dari instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata serta kajian pustaka digunakan untuk mengetahui tentang metode-metode yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah cara mengumpulkan data berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap gejala fisik objek penelitian. Metode ini digunakan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek untuk memperoleh gambaran nyata tentang kepariwisataan beserta fasilitas pendukung pelayanan objek wisata yang tersedia. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek wisata alam untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dalam pemeliharaan lingkungan kawasan objek wisata serta pengimplementasian program renstranya dalam memajukan industri pariwisata daerah sebagai perwujudan misi pembangunan kota Ternate. Proses pengamatan dilakukan dalam waktu 2 hari di beberapa kawasan objek wisata.

3. Metode Wawancara (*interview*)

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Metode ini bertujuan memperoleh data dan informasi secara langsung dari sumber data yang terkait dengan kepariwisataan.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang diperoleh dikelompokkan dalam indikator-indikator penelitian, kemudian dikaji secara mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi atau dampak yang ditimbulkannya.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dalam beberapa tahapan yakni:

1. Menganalisis peran pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata kota dalam menerapkan program pembangunan perencanaan strategis sesuai dengan arahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Memantau kinerja aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan proyek kegiatan perencanaan strategis pada obyek wisata alam.
3. Meninjau hasil kegiatan program dan evaluasi program ekowisata serta dampak yang ditimbulkan sebagai ukuran pencapaian prestasi kinerja.

BAB IV

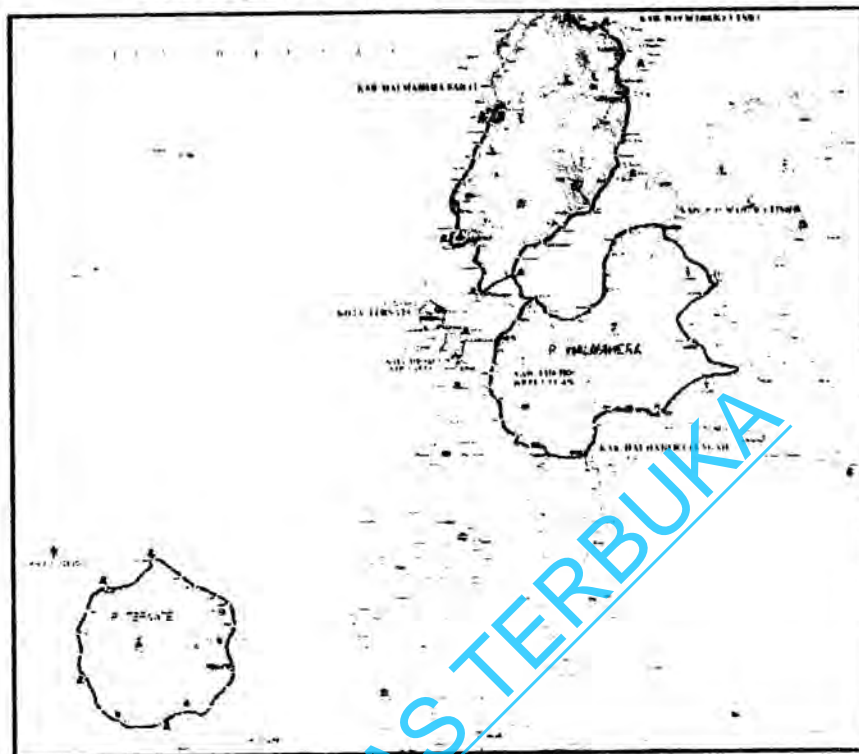
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 april 1999, maka Kota Ternate telah mengalami peningkatan status yang dulunya Kota Administratif menjadi Kotamadya. Peningkatan status tersebut tidak terlepas dari perkembangan daerah sebagai aspek sosial kemasyarakatan dan aspek perkembangan perekonomian. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administrative dibagi menjadi 3 kecamatan dengan 58 desa/kelurahan. Dinamika pembangunan yang terjadi akibat pelaksanaan secara sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat telah membawa dampak perubahan yang ditandai dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Secara fisik kota Ternate di batasi oleh kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan kondisi geografisnya adalah berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur.

Gambar. 4.1
Peta Kepulauan Maluku Utara dan Pulau Ternate



Sumber: Data Statistik Tahun 2008.

Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak gunung Gamalama, terletak di tengah-tengah pulau di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2%-8%. Luas daratan kota Ternate sebesar 250.85 km, sementara lautannya 5.547,55 km dengan pendekatan fisiografi, bentangan alam kota Ternate di kelompokkan atas daratan, pantai, perbukitan dan pegunungan termasuk di dalamnya dataran tinggi dengan pelerangan bervariasi. Pemukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai. Aktivitas pemerintahan dan

kemasyarakatan di kota Ternate pada awal pembentukannya secara administratif dibagi menjadi 4 kecamatan dengan 63 desa atau kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Wilayah Kecamatan Pulau Ternate

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1	Pulau Ternate	21	Jambula
2	Moti	0	Moti Kota
3	Ternate Selatan	19	Kalumata
4	Ternate Utara	17	Dufa-dufa
Jumlah		63	

Sumber: Data Statistik, Kota Ternate dalam angka 2008

2. Penduduk

Permasalahan penduduk menjadi bagian utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti kesehatan, pendidikan dan ketersediaan sarana bagi aktivitas baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk yang didasari pada hasil survey penduduk antar Sensus (Supas, 2005) dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2007) adalah sejumlah 176.838 jiwa, dan tersebar

di empat kecamatan. Tingkat penyebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat seperti uraian berikut:

1. Kecamatan Pulau Ternate	: 19.133 jiwa	(10,82%)
2. Kecamatan Moti	: 4.797 jiwa	(2,71%)
3. Kecamatan Ternate Selatan	: 78.989 jiwa	(44,67%)
4. Kecamatan Ternate Utara	: 733.919 jiwa	(41,80%)

Seiring dengan perkembangan kota Ternate yang saat ini telah menjadi ibukota sementara Propinsi Maluku Utara berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk sebanyak 176.838 jiwa.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan *dari, ke, dan selama di* daerah tujuan wisata mulai dari darat, laut sampai udara. Aksesibilitas menyoroti tentang infrastruktur transportasi. Akses ini tidak hanya menyangkut aspek kuantitas tetapi juga inklusif mutu, ketetapan waktu, kenyamanan, dan keselamatan. Faktor penunjang kunjungan wisatawan ke tujuan wisata adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana wisata yang memadai. Sistem transportasi yang baik akan mendukung kelancaran aksesibilitas ke berbagai daerah. Pemerintah kota Ternate secara bertahap terus membangun sarana transportasi baik berupa pemeliharaan, maupun penambahan jalan baru untuk memudahkan masyarakat

mengakses berbagai kebutuhannya. Selain transportasi darat, di daerah ini juga telah tersedia sarana angkutan laut dan udara.

1. Jalan Raya

Realisasi pembangunan jalan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah ini hingga tahun 2007 mencapai 211,647 km jalan aspal dan 63,958 km masih merupakan jalan tanah. Berdasarkan kondisi alam pada tahun yang sama tercatat sepanjang 83,359 km (30,24 %) dikategorikan baik, sepanjang 80,499 km (29,21%) keadaannya rusak dan 9,966 km (3,62%) dalam keadaan rusak berat.

2. Penyebrangan

Jasa angkutan penyebrangan melalui kota Ternate dengan trayek antar Kabupaten dalam Provinsi Maluku Utara dilayani oleh PT. (persero) ASDPCabang Ternate dengan menggunakan beberapa buah kapal *Fery*. Pada sektor pelayaran, sebagaimana kita ketahui bahwa kota Ternate merupakan bentuk kepulauan gunung berapi yang dipisahkan oleh lautan dari pulau-pulau lainnya, sehingga akses perhubungan dari berbagai daerah disekitarnya ditempuh dengan jalur pelayaran. Pelayaran memegang peranan penting dalam hal pergerakan barang dan orang antar pulau karena Ternate yang merupakan pusat perekonomian, perdagangan dari berbagai daerah disekitarnya. Saat ini terdapat Empat dermaga laut yang melayani rute pelayaran dari berbagai daerah seperti Dermaga

Ahmad Yani, Dermaga Bastiong, Dermaga Dufa-dufa, Dermaga *Fery*, dan beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya yang melayani jasa perhubungan antar kepulauan disekitarnya.

Selain itu diakhir tahun 2007 tercatat kendaraan roda empat sebanyak 29,725 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 44,418 unit. Di kota Ternate angkutan umum seperti mobil, taksi, ojek dan delman menjadi pilihan sarana transportasi di kota.

3. Angkutan Laut

Kota Ternate yang mempunyai ciri kepulauan dan memiliki luas lautan lebih besar tentunya memerlukan sarana angkutan laut untuk memperlancar arus penumpang maupun distribusi barang kebutuhan masyarakat dari dan keluar daerah ini. Selain itu sebagai pusat perdagangan kegiatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, banyak kapal-kapal penumpang maupun barang yang berlayar dan singgah di pelabuhan Ternate. Sampai saat ini terdapat 4 Dermaga dan beberapa pelabuhan kecil lainnya yang melayani rute penyeberangan barang dan jasa antar pulau-pulau sekitarnya dermaga tersebut diantaranya adalah, Dermaga Ahmad Yani, Dermaga Dufa-dufa, Dermaga Bastiong dan Dermaga angkutan kapal *Fery*.

4. Angkutan Udara

Sarana angkutan udara di daerah ini menunjukkan perkembangan yang relatif semakin baik dari tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan bertambahnya perusahaan maskapai penerbangan yang melakukan investasi dengan fasilitas baik berupa tarif maupun pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan yang bervariasi. Pada tahun 2007 jalur penerbangan di kota Ternate dilayani oleh empat maskapai yaitu Merpati Nusantara Airlines, Express Air, Lion Air yang bekerja sama dengan Wings Air serta Trigana Air dengan volume penerbangan yang lebih besar tahun sebelumnya. Aksesibilitas pendukung jalur udara terdapat pada bandara Babullah, area sebelah utara kawasan kota Ternate tepatnya di Kel. Akehuda. Lintas penerbangan menjadi pilihan kebanyakan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelengkap

Sarana dan prasarana pelengkap kepariwisataan yang dimaksud adalah berhubungan langsung dengan kepariwisataan itu sendiri seperti sarana penunjang aksesibilitas, hotel, restoran dan kafe, telekomunikasi, lembaga keuangan serta penunjang lainnya seperti ketersediaan air bersih, dan listrik. Kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di suatu daerah dapat menunjang perkembangan industri pariwisata. Sarana penunjang kepariwisataan di kota Ternate dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perhotelan

Perhotelan merupakan salah satu sarana penunjang kepariwisataan daerah, di kota Ternate industri perhotelan berkembang cukup pesat terutama karena adanya peningkatan-peningkatan jumlah tamu-tamu wisatawan yang berkunjung di daerah. Dari data yang diperoleh terdapat sebanyak 20 Hotel yang tersebar di seluruh perkotaan Ternate, salah satu hotel yang menjadi kebanggaan kota adalah Hotel Amara / PT. Bela yang terdapat di Kel. Jati. Angka peningkatan pengunjung hotel Amara terus meningkat dari waktu ke waktu. Hotel amara dengan fasilitas berkelas internasional diminati pengunjung terutama wisatawan manca Negara.

Selain Hotel Amara terdapat hotel-hotel lainnya yang melayani kunjungan tamu wisatawan dari luar daerah yaitu seperti Corner Place Hotel dengan angka kunjungan pertahun 2008 untuk wisatawan dalam negeri sebanyak 3.324 sedangkan kunjungan wisatawan asing tahun 2008 berjumlah 13 orang. Hotel Boulevard yang bertempat di Kel. Gamalama letaknya tidak jauh dari pelabuhan Ahmad Yani dan pelabuhan transit Sidangoli memiliki jumlah kunjungan tamu wisatawan yang cukup meningkat di tahun 2008 diantaranya, kunjungan wisatawan dalam negeri berjumlah 4.538 dan kunjungan wisatawan asing berjumlah 42 orang.

Dari informasi data tersebut di atas dapat diketahui bahwa arus pengunjung wisatan asing ataupun dalam negeri terus meningkat dari waktu ke waktu dan menjadikan kota Ternate semakin maju sebagai wujud kota wisata, budaya dan kota perdagangan, selain ketiga hotel tersebut diatas terdapat 17 Hotel-hotel yang terdapat dikota Ternate diantaranya: Hotel Bukit Pelangi, Hotel Surya Pagi, Hotel Archie, Hotel Ternate City, Hotel Ayu Lestari, Hotel Zhavitry, Hotel Nirwana, Hotel Neraca, Hotel Savirna, Putri Azzalia Hotel, Hotel Muara, Hotel Anda Baru, Hotel Bastiong Indah, Hotel Taman Ria, Hotel Indah, AR Sejahtera Hotel, dan Hotel Barokah Abadi Sejati.

2. Lembaga Keuangan

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan di sini adalah lembaga keuangan yang membantu kemudahan urusan pertukaran mata uang asing dengan mata uang Rupiah sesuai dengan kebutuhan wisatawan tersebut. Saat ini terdapat 10 buah Bank di kota Ternate diantaranya adalah Bank Indonesia (Bank Sentral) satu buah, bank pemerintah 4 buah yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan 6 buah bank swasta seperti Bank Mandiri, Bank Artha Graha, Bank Danamon, Bank Mega, Bank BTN dan Bank Muamalat. Bank-bank tersebut dapat membantu pertukaran mata uang asing kedalam bentuk Rupiah meskipun hanya dibeberapa Bank saja namun hal tersebut

merupakan faktor penting yang mempermudah segala kebutuhan wisatawan ketika ia berada di daerah.

3. Listrik dan PDAM

Meninjau infrastruktur kota Ternate tidak lepas dengan kebutuhan listrik yang sepenuhnya dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah Maluku Cabang Ternate sebagai produsen yang mendistribusikan energi listrik kepada para pelanggan selaku konsumen listrik di daerah. Menurut data Badan Statistik daerah kota Ternate mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum seluruh wilayah di kota Ternate dapat menikmati energi listrik yang dipasok oleh PT. PLN Cabang Ternate, disebabkan oleh masalah geografis yang sulit dijangkau seperti pulau Hiri, pulau Batang Dua, dan pulau Moti. Untuk mengatasi masalah di daerah tersebut masyarakat menggunakan energi listrik secara swadaya.

Namun khusus pada kota Ternate pasokan listrik mampu menjangkau kawasan-kawasan utara, selatan dan kota, sehingga kebutuhan listrik khususnya pulau Ternate dapat terpenuhi sepenuhnya. Sedangkan kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Maluku Utara yang melayani masyarakat sebagai konsumen di kota Ternate. Kebutuhan air minum setiap tahun terus meningkat. Selama tahun 2007 suplai air bersih oleh PDAM tercatat sebanyak 4.763.462 m³ yang berarti telah terjadi kenaikan air bersih

sebesar itu disalurkan kepada 15.299 pelanggan aktif yang juga mengalami peningkatan sebanyak 46 atau 0,30 % dibanding tahun lalu.

4. Pos dan Telekomunikasi

Saat ini pelayanan jasa Telekomunikasi di kota Ternate, dilakukan oleh PT. Telkom cabang Ternate yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat konsumen dari waktu-ke waktu. Kemajuan dibidang informasi telekomunikasi tidak dapat dipisahkan sangat membantu proses penyaluran informasi dari satu tempat ketempat lainnya, dengan teknologi mutakhir masyarakat pengguna telepon merespon telepon nirkabel atau HP (hand phone) dengan cara yang sangat praktis. Jumlah pelanggan telepon sampai akhir tahun 2007 sebanyak 7,887 hal ini mengalami penurunan sejumlah 269 atau sekitar 3,41% dari tahun sebelumnya. Pos yang berfungsi sebagai pelayanan jasa pengiriman barang antar wilayah juga memegang peranan penting, saat ini pelayanan jasa pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (persero). Terdapat 3 kantor Pos, satu kantor cabang bertempat di bagian kota sedangkan satu sebagai kantor pos pembantu yang terlatak di bagian utara kota tepatnya di kelurahan Akehuda.

5. Profil Objek Wisata Kota Ternate

Kota Ternate dengan luas wilayah dataran 250,85 km² ini memiliki beragam potensi sebagai objek wisata yang menjanjikan. Berbagai sektor telah di kembangkan sesuai dengan potensi daerah dan memanfaatkan keterkaitan dengan daerah lain. Potensi objek wisata yang terdapat dalam kota Ternate sangat beragam dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Objek Wisata Alam dan Pantai
- 2) Objek wisata Sejarah
- 3) Objek wisata Budaya

Tabel. 4.2
Objek Wisata Alam Dan Pantai

No	Objek Wisata	Lokasi
1	Batu Angus	Desa Kulaba, Kecamatan Kota Ternate Utara.
2	Danau Laguna	Desa Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan
3	Danau Tolire Kecil	Desa Takome, Kecamatan Kota Ternate Utara.
4	Danau Tolire Besar	Desa Takome, Kecamatan Kota Ternate Utara.
5	Pantai Kastela	Desa Kastela, Kecamatan Kota Ternate Utara.
6	Pantai Tobololo	Desa Tobololo, Kecamatan Kota

		Ternate Utara.
7	Pantai Sulamadaha	Desa Sulamadaha, Kecamatan Kota Ternate Utara.
8	Pantai Bobane Ici	Desa , Kecamatan Kota Ternate Selatan

Sumber: Data Dinas Pariwisata Kota Ternate 2009.

Tabel. 4.3
Objek Wisata Sejarah

No	Objek Wisata	Lokasi
1	Benteng Orange	Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Selatan
2	Benteng Tolokko	Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara.
3	Benteng Gamlamo atau Benteng Nostra Senora ndel Rosario	Desa Kastela, Kecamatan Kota Ternate Tengah
4	Benteng Kota Janji	Desa Ngade, Kecamatan Kota Ternate Tengah
5	Sumur Layang	Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah
6	Cengkeh Afo	Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Selatan

Sumber: Data Dinas Pariwisata Kota Ternate 2009.

Tabel. 4.4
Obyek Wisata Budaya dan Sejarah

No	Objek Wisata	Keterangan
1	Bambu Gila	Tarian Daerah
2	Dadansa	Tarian Daerah
3	Gereja Katolik Santo Willibrodus	Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah
4	Genta Maria	Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah
5	Klenteng	Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah
6	Mahkota Berambut	Kedaton Sultan Ternate, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara
7	Masjid Sultan Ternate	Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara
8	Makam Sultan Babullah	Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah
9	Makam Sultan Badaruddin II	Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah

Sumber: Data Dinas Pariwisata Kota Ternate 2009.

Dari berbagai macam objek wisata tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata dan daerah sepakat menentukan objek wisata pantai Sulamadaha sebagai *icon* resmi pariwisata kota Ternate. Kawasan objek wisata pantai Sulamadaha yang terletak di desa Sulamadaha kecamatan Pulau Ternate yaitu 14 km dari pusat kota. Letaknya berada pada \pm 10 km dari puncak gunung Gamalama. Sebelah utara berhadapan dengan pulau Hiri dan kepulauan

Halmahera di sebelah baratnya. Dengan jenis tanah *Rogusal*, tumbuhan seperti cengkih, pala, fuli, dan kelapa menjadi komoditas unggul yang memberikan keuntungan ekonomi bagi sebagian besar petani di kota Ternate khususnya pada kawasan desa Sulamadaha. Sehingga tanaman pala, cengkih, kelapa banyak ditemukan di sekitar objek wisata desa Sulamadaha.

Objek wisata daerah ini relatif berkembang pesat lebih dari 30 tahun oleh karena potensi eksotis daya tarik wisata sehingga setiap tahunnya mengalami peningkatan pengunjung wisata terbanyak dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya. Peningkatan kunjungan wisatawan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri memberikan kontribusi pendapatan retribusi daerah dari sektor pajak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum. Ketentuan yang menjadi acuan penyaluran retribusi objek wisata pantai Sulamadaha adalah jumlah dari hasil retribusi 60% dikhususkan untuk pembangunan objek wisata Suladaha, 40% untuk DISBUDPAR dan sisanya 10% dikhususkan sebagai biaya pengawasan. Dengan penyaluran retribusi 60% yang ditujukan untuk peningkatan objek wisata Sulamadaha baik dalam bentuk proyek, jasa ataupun proses. Berdasarkan hasil rekapitulasi objek wisata pantai Sulamadaha tahun 2009 terjadi peningkatan bervariasi dari bulan ke bulan dengan beragam hasil penerimaan.

Tabel 4.5.
Rekapitulasi Objek Wisata Pantai Sulamadaha
Tahun 2009

No	Bulan	Jumlah Setoran	60% Untuk Sulamadaha	40% Untuk DISBUDPAR	10% Untuk Biaya Pengawasan	Jumlah PAD	Jumlah Pengunjung
1	Januari	13.200.000	7.920.000	5.280.000	528.000	4.752.000	7600 Orang
2	Februari	10.700.000	6.420.000	4.280.000	428.000	3.852.000	2150 Orang
3	Maret	9.900.000	5.940.000	3.960.000	396.000	3.564.000	6600 Orang
4	April	16.250.000	9.750.000	6.500.000	650.000	5.850.000	5955 Orang
5	Mei	10.050.000	6.030.000	4.020.000	402.000	3.618.000	6650 Orang
6	Juni	13.500.000	8.100.000	5.400.000	540.000	4.860.000	8300 Orang
7	Juli	20.300.000	12.180.000	8.120.000	812.000	7.308.000	6200 Orang
8	Agustus	10.500.000	6.300.000	4.200.000	420.000	3.780.000	5100 Orang
9	September	13.550.000	8.130.000	5.420.000	542.000	4.878.000	6300 Orang
10	Oktober	8.850.000	5.310.000	3.540.000	354.000	3.186.000	3300 Orang
11	November	6.250.000	3.750.000	2.500.000	250.000	2.250.000	3100 Orang
12	Desember	18.250.000	10.950.000	7.300.000	730.000	6.570.000	5100 Orang
Jumlah		151.300.000	90.780.000	60.250.000	6.052.000	54.468.000	54.855 Orang

Sumber Dinas Pariwisata kota Ternate 2009.

Berdasarkan data tabel tersebut diatas tahun 2009 dapat diketahui bahwa angka peminat terhadap objek wisata pantai Sulamadaha mengalami siklus perkembangan yang bervariasi disetiap bulannya. Angka jumlah pengunjung perbulannya ditentukan oleh intensitas hari libur dan atraksi pergelaran wisata di objek wisata, misalnya promosi budaya dan kegiatan lainnya.

6. Karakteristik Responden

Masyarakat yang diteliti adalah masyarakat yang berada di kota Ternate dan sekitarnya, terutama yang terkait langsung dengan penelitian ini. Sumber data yang di peroleh dari responden dalam penelitian ini adalah berasal dari Dinas Pariwisata Kota Ternate, Bapeda, Masyarakat, dan beberapa turis asing di kota Ternate. Populasi responden yang terdapat pada Dinas Pariwisata Kota Ternate berjumlah sebanyak 60 orang, Bapeda sebanyak 71 orang, Masyarakat lokasi obyek wisata sebanyak 578 orang dan turis asing sebanyak 3 orang. Responden yang di ambil sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Umur responden bervariasi antara 30 - 60 tahun dengan klasifikasi jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang.

Tingkat pendidikan responden sangat bervariasi dari 10 orang responden yang di wawancara diketahui bahwa responden memiliki tingkat pendidikan tertinggi adalah berasal dari turis asing berasal dari Belanda Mr. Marx dan Mr Michele dari Irlandia, sementara responden dengan tingkat pendidikan S2 adalah dari Bapeda kota Ternate, Tingkat pendidikan S1 responden yang berasal dari turis Belanda Miss. Coby dan beberapa responden dari Dinas Pariwisata kota Ternate. Klasifikasi pendidikan SMA adalah responden berasal dari perwakilan masyarakat setempat obyek wisata.

7. Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Sektor Pariwisata

1. Visi

Sebagaimana diketahui bahwa visi dapat diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana organisasi tersebut akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang keadaan masa depan yang di inginkan oleh sebuah organisasi. Dengan pertimbangan tersebut dikemukakanlah Visi Kota Ternate yakni : "Menjadikan Ternate Sebagai Kota Budaya Menuju Masyarakat Madani".

Sejalan dengan visi kota Ternate maka visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Ternate adalah: "Terwujudnya Kebudayaan dan Pariwisata Yang Maju dan Berbasis Kerakyatan Menuju Masyarakat Madani".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, maka ditetapkanlah Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang abstrak akan terlihat pada misi dengan lebih nyata. Adapun Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate adalah:

1. Peningkatan pengembangan daerah dan usaha kepariwisataan
2. Penelitian dan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah.

4. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri.
5. Perlindungan dan pemanfaatan warisan dan nilai budaya daerah.
6. Pengembangan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
7. Mewujudkan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
8. Menjadikan kebudayaan dan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Strategi dan Kebijakan, Sektor Pariwisata

Kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan strategi kebijakan program pembangunan kota Ternate. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Ternate sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi obyek wisata sebagai sumber pendapatan daerah dan peluang usaha serta kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka perencanaan dan pengembangan potensi budaya dan pariwisata.
3. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan guna pelestarian apresiasi nilai-nilai seni budaya kota Ternate sebagai penunjang peningkatan daya tarik wisata.
4. Mengupayakan terselenggaranya diklat kepariwisataan bagi pengelola/ karyawan / usahawan kepariwisataan untuk peningkatan sumber daya manusia pada sektor kepariwisataan.
5. Meningkatkan kegiatan promosi melalui berbagai sarana/media promosi yang ada.
6. Penetapan kawasan wisata kota Ternate yang meliputi:
 - a) Pantai Sulamadaha
 - b) Pantai Kastela
 - c) Pantai Bobane Ici
 - d) Pantai Bobane Lamo
 - e) Danau Tolire
 - f) Danau Laguna
 - g) Benteng Kastela
 - h) Benteng Kalumata
 - i) Benteng Orange
 - j) Benteng Tulokku
 - k) Kesultanan Ternate

B. Pembahasan

Saat ini industri pariwisata daerah dihadapkan pada suatu tantangan persaingan destinasi wisata dari berbagai kawasan seluruh Nusantara. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan tersebut, maka strategi mendasar yang perlu ditempuh dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata alam pantai Sulamadaha adalah mendayagunakan seluruh potensi jasa lingkungan dan optimalisasi fungsi yang terdapat dalam kawasan tersebut baik yang berupa ekosistem, flora, fauna, untuk dimanfaatkan dan didayagunakan secara optimal sebagai destinasi tujuan wisata nasional. Sebagai salah satu objek wisata alam kota Ternate yang menjadi sasaran pengembangan dan sebagai *icon* wisata daerah.

Merujuk pada perspektif yang termuat dalam rumusan Renstra tersebut, maka ada beberapa hal yang masih perlu dicermati terutama bagi pemangku kepentingan untuk meninjau kembali konsep kebijakan perencanaan strategis serta program-program kegiatan yang masih menyisahkan permasalahan tersebut antara lain :

1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang masih minim, terbatas dengan keadaan fisik yang rusak.
2. Minimnya pengawasan, perlindungan terhadap ekosistem dan habitat kawasan objek wisata.
3. Peningkatan penataan objek wisata pantai Sulamadaha terkait dengan zonanisasi kawasan, tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan masih belum optimal. Penentuan zone ditekankan pada pengaturan fisik dengan menonjolkan *core product* atau objek central yang menjadi tujuan utama.
4. Masih lemahnya sistem evaluasi kinerja maupun evaluasi terhadap kualitas program-program kegiatan atau prasarana fisik yang telah diwujudkan.
5. Permasalahan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta lemahnya kemampuan manajerial para pengelola kelembagaan.

1. Evaluasi program pembangunan kawasan ekowisata di kota Ternate.

Sesuai dengan ketentuan kebijakan dalam konsep perencanaan strategis dinas pariwisata kota Ternate tahun 2006 – 2010 maka penerapan program ekowisata kota Ternate khususnya pada ruang lingkup objek wisata alam di kawasan wisata pantai Sulamadaha terdiri dari 10 program kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Rencana Program Kegiatan Dinas Pariwisata
Kota Ternate tahun 2006-2010

No	Kebijakan	Program	Indiator Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan penataan objek wisata Pantai Sulamadaha	Pengembangan objek wisata	Jumlah fasilitas objek wisata Pantai Sulamadaha tersedia	2007
2	Penyusunan pengembangan objek wisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah pengembangan objek wisata	2007
3	Peningkatan sarana transportasi objek wisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah fasilitas penunjang objek wisata (perahu Kora-kora 5 buah)	2008
4	Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 1.Melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan Kepada Masyarakat 2.Melaksanakan Seminar Kebudayaan dan	2008

			Pariwisata	
5	Tersedianya Bahan Promosi Daerah	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Dan Luar Negeri	2008
6	Peningkatan sarana transportasi objek wisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah Objek wisata bahari yang tersedia	2009
7	Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat untuk mendukung jasa kepariwisataan daerah	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	2009
8	Meningkatkan Peran Serta Swasta Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Daerah	Pengembangan pariwisata	Jumlah fasilitas penunjang objek wisata (<i>Jet Sky</i> 1 buah)	2009
9	Peningkatan pengembangan dan penataan objek wisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah fasilitas sarana objek tersedia	2010
10	Peningkatan sarana penunjang kegiatan objek wisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah sarana transportasi <i>Speed Boat</i> 1 Unit.	2010

Sumber: Renstra SKPD dinas pariwisata kota Ternate.

Berdasarkan program pembangunan kepariwisataan khususnya pada kawasan objek wisata alam pantai Sulamadaha pada tahun 2007 hingga 2010, maka penerapan program pariwisata tersebut terbagi dalam kategori realisasi program ke dalam bentuk proyek penyediaan barang dan jasa ataupun proses. Murphy (1993) (dalam Oka A. Yoety, 2005:52) mengatakan bahwa perencanaan dan pembangunan pariwisata adalah untuk memperoleh dampak positif bagi perkembangan ekonomi (dari segi pemerintah) dan perdagangan pada suatu daerah tujuan wisata bagi pengusaha.

Namun Murphy menganjurkan supaya industri pariwisata tidak lupa memprioritaskan faktor lingkungan dan sosial berlandaskan dengan keinginan untuk mengembangkan perekonomian pada daya tarik wisata tersebut. Kawasan objek daya tarik wisata juga mengalami ancaman terbesar dari degradasi keanekaragaman hayati, sehingga memerlukan strategi yang tepat guna melibatkan kepedulian banyak pihak untuk menekan laju kerusakan lingkungan. Kegiatan ekowisata yang berwawasan lingkungan memberi harapan akan adanya suatu kerangka pikiran yang bisa mengkombinasikan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kesadaran lingkungan menjadi bagian dari perilaku dan kebutuhan esensial wisatawan. Isu pencemaran seringkali menjadi perhatian, bahan perdebatan dan keprihatian publik saat ini. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Bab VI tentang Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 27 menjelaskan bahwa pemanfaatan kondisi

lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Kemudian selanjutnya pada pasal 26 dan 28 dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undang tersebut di atas menjelaskan pada kita bahwa pariwisata alam merupakan salah satu sektor pembangunan yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian untuk dimanfaatkannya dan mengembangkannya sesuai dengan kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Sejauh ini, para pengguna sumberdaya memanfaatkan sumber daya alam begitu saja tanpa melakukan kegiatan pelestarian apapun terhadapnya. Hal ini mengakibatkan kegagalan kerusakan lingkungan dengan cepat dapat mengancam ketersediaan sumberdaya alam tersebut dalam jangka panjang.

Ekowisata merupakan sebuah konsep yang bertujuan memperhatikan aspek eksploitasi sumber daya alam beserta aspek dampak dari kerusakan lingkungan hidup dalam ruang lingkup tatanan wisata alam. Kegiatan ekowisata justru mampu bersama-sama bergerak maju dalam meningkatkan pengembangan wisata daerah sekaligus dapat menggerakkan perkembangan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan analisa survei maka konsep pengembangan ekowisata daerah di kawasan pantai Sulamadaha masih belum sesuai dengan standarisasi, tujuan dan prinsip-prinsip ekowisata yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat lokal dengan upaya peningkatan mutu produk wisata. Padahal dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu kawasan objek wisata, kebutuhan terhadap produk yang originalitas, otentisitas, berkompeten serta berkualitas akan mendorong minat dan arus kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

Untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang bermutu dan berdaya saing maka perencanaan pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan ditempuh sesuai dengan karakteristik kawasan objek wisata dan menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut dengan program-program kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan dan tujuan pembangunan berbasis pada konsep dan prinsip-

prinsip ekowisata. Adapun keseluruhan program kegiatan yang dikhususkan pada objek wisata pantai Sulamadaha sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar adalah merupakan program pembangunan yang ditujukan pada kegiatan perwujudan sarana dan prasarana penunjang objek wisata. Untuk mengetahui realisasi program pembangunan kawasan pariwisata pantai Sulamadaha maka dapat di lihat dari hasil wawancara bersama sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ternate Bpk Hasmy Syamsuddin (11 Juni 2009) sebagai berikut:

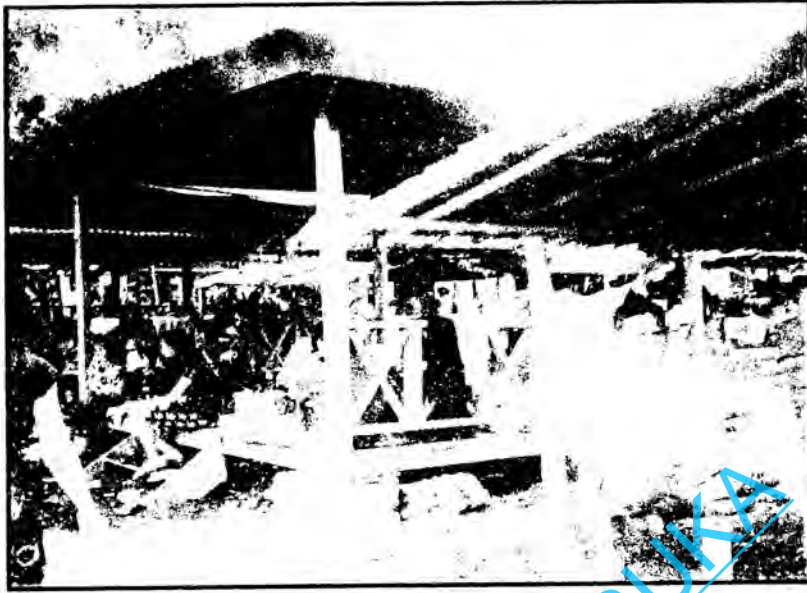
".... implementasi program kegiatan renstra khususnya di pantai Sulamadaha adalah dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung dari tahun 2007 hingga 2009 telah terealisasi, namun di tahun 2010 ini, akibat krisis keuangan dan ketidakstabilan kondisi perekonomian sehingga tidak semua program kegiatan yang di canangkan di tahun 2010 dapat terealisasi".

"...pembangunan pariwisata di kota Ternate adalah diprioritaskan pada penataan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kawasan pantai Sulamadaha karena memiliki panorama yang indah dan menarik kunjungan wisatawan sehingga hasil atau income yang didapatkan dalam penerimaan retribusi pajak meningkat".

Adapun hasil dari program kegiatan yang telah terimplementasikan berupa dalam bentuk fisik ataupun penyediaan infra struktur serta sarana dan prasarana berupa pengadaan Gazebo (rumah panggung), Perahu Kora-Kora dan pengadaan sebuah *Spit Boat*. Sesuai dengan hasil implemantasi program kegiatan tersebut maka dapat hasil sarana dan prasarana penunjang tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

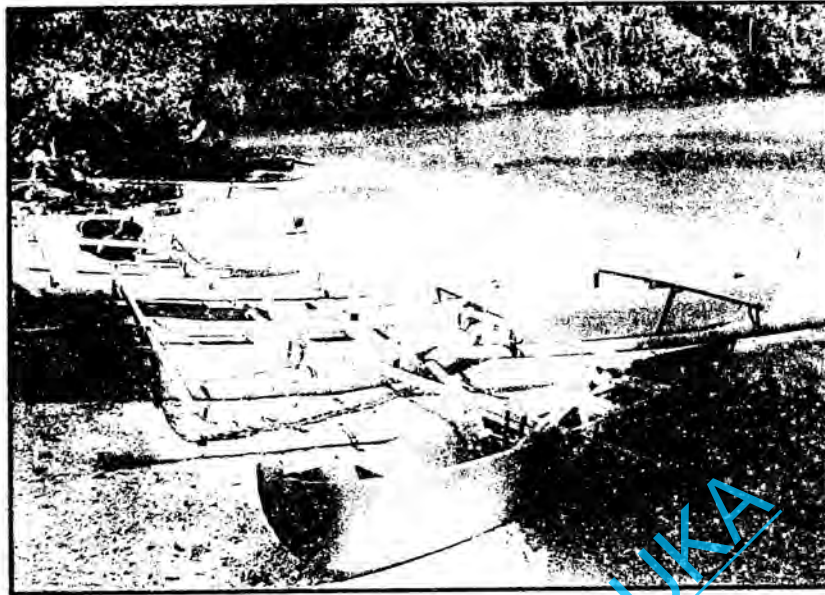
Gambar 4.2
Gazebo (rumah panggung wisata)





Gambar 4.3.
Perahu Kora-kora





Sementara itu pengadaan sebuah *Spit Boa* dalam realisasi tahun 2010 tidak dapat diwujudkan sesuai dengan pernyataan Sekretaris Dinas bpk. Hasmy “, *namun di tahun 2010 ini, akibat krisis keuangan dan ketidakstabilan kondisi perekonomian sehingga tidak semua program kegiatan yang di canangkan di tahun 2010 dapat terealisasi*’.

Selanjutnya dalam tahapan peningkatan pengembangan dan penataan objek wisata daerah serta penataan objek wisata merupakan suatu program dalam wujud proses kegiatan berupa penyuluhan kepada masyarakat pelaku wisata khususnya tentang upaya kebersihan objek wisata, penataan lahan industri dan perlindungan terhadap lingkungan yang terdapat di kawasan wisata tersebut. Namun, hingga sekarang ini hasil program kegiatan tersebut masih belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan hal ini diakui oleh

kepala seksi objek wisata, rekreasi, dan hiburan Ibu Shanty B, SE pada 11 Juni 2009 bahwa:

“kegiatan sosialisasi penyuluhan terhadap masyarakat sekitar telah diupayakan , dan bagi para pedagang di sekitar objek wisata untuk dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya agar selalu bersih dan sehat”.

“upaya sosialisasi dilakukan dengan tujuan pembangunan kawasan wisata dapat tercipta sapa pesona namun kesadaran masyarakat masyarakat masih sangat minim sehingga daerah objek wisata kerap kali menjadi tidak terawat”.

Statement tersebut sama halnya disampaikan oleh seorang turis asing Mr Marx yang berasal dari Belanda dalam kunjungannya bulan September 2009 menuturkan bahwa:

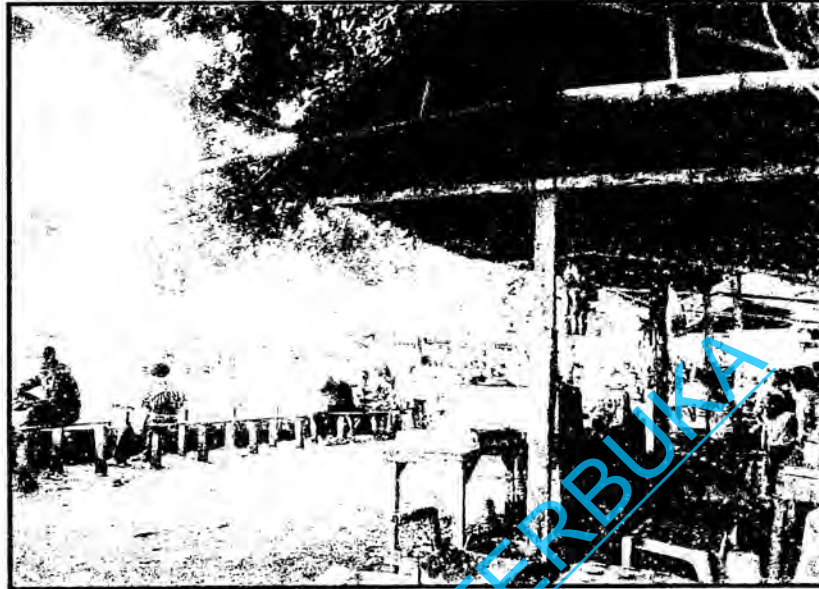
“..I am very happy to be in this area, friendly people made me feel welcome. Eco-tourism here is very interesting and beautiful. Shortcomings lies in the professional handling of the environment and ecosystem sustainability.(saya sangat senang berada di daerah ini. penduduk yang ramah membuat saya merasa diterima. ekowisata di sini sangat menarik dan indah. kekurangannya terletak pada penanganan yang profesional terhadap lingkungan dan kelestarian ekosistem.”

Adanya keprihatinan terhadap kawasan wisata pantai Sulamadaha adalah berdasarkan pada kualitas lingkungan dan pengawasan terhadap pelaku wisata yang sangat minim, padahal objek wisata pantai Sulamada merupakan *icon* wisata kota Ternate hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

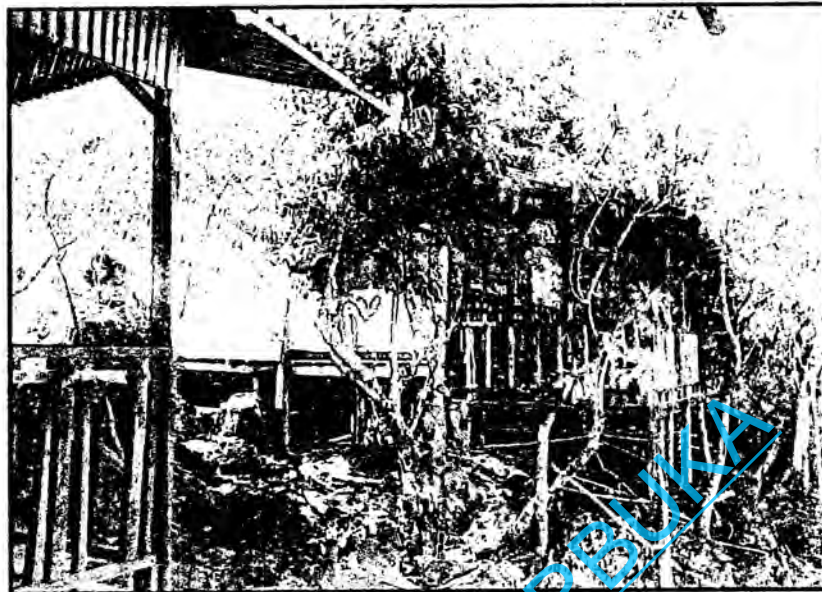
Gambar 4.4
Kualitas sarana penunjang (Panggung Wisata)



Gambar 4.5
Pelaku Industri Kecil Masyarakat
Pada Kawasan Pantai Sulamadaha



Gambar 4.6
Kualitas Lingkungan Pembangunan Objek Wisata



Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap kawasan wisata pantai Sulamadaha dan terhadap program-program kegiatan pembangunan dalam renstra SKPD tahun 2006 – 2010, maka evaluasi terhadap program kegiatan mesti dilakukan untuk dapat melakukan penilaian-penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari pengimplementasian program kegiatan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Crawford (2000; 30) dalam (Husnul K) tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pendekatan dalam melakukan evaluasi adalah dengan pendekatan *objective-oriented approach*. Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program atau proyek dan seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Untuk itu ukuran keberhasilan yang dicapai harus disejajarkan dengan tujuan pembangunan pariwisata kota Ternate yang ditetapkan sebagai basis pencapaian atau target. Tujuan pembangunan kepariwisataan yakni sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan dinas yang mendukung kinerja pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan bebas KKN.
2. Meningkatkan sistem pengawasan kinerja secara efektif.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penentuan kebijakan demi pengembangan bidang kebudayaan pariwisata.
4. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
5. Mengoptimalkan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata.
8. Meningkatkan penyuluhan dan pelatihan.
9. Mempersiapkan sarana dan bahan promosi.

Tujuan yang diempuh dalam pengembangan kawasan objek wisata pantai Sulamadaha adalah disesuaikan dengan konsep wisata alam (ekowisata) yang mana upaya mengoptimalkan potensi pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan, disamping itu peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang belum mendapatkan porsi dalam perumusan program kegiatan perencanaan strategis 2006 - 2010 semestinya menjadi ukuran mewujudkan pembangunan wisata berwawasan lingkungan (ekowisata). Menurut pendapat Bpk. Rizal Marsaoly, SE. (BAPEDA) 21 Juni 2009 menjelaskan bahwa:

“Tidak semua program SKPD dapat disetujui, hanya sebagian yang dianggap prioritas saja sebab minimnya plafon anggaran yang ditujukan buat setiap instansi daerah”.

Hal senada dalam penuturan tersebut diatas dikemukakan oleh bpk Hasyim Syamsudin 11 Juni 2009 menjelaskan bahwa:

“Ukuran dan tingkat kemajuan yang dicapai masih terus digalakkan, dan hasil dari realisasi program tersebut sudah cukup berhasil dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung setiap waktu, tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi”.

Ukuran dalam menentukan kemajuan dibidang wisata alam pada kawasan pantai Sulamadaha adalah dengan tinjauan angka jumlah kunjungan arus wisatawan yang datang ke lokasi wisata terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan hasil data temuan dari rekapitulasi angka kunjungan wisatawan asing maupun lokal sejak tahun 2003 hingga tahun 2008 terjadi kenaikan sebanyak 100% sementara kunjungan wisatawan asing mengalami peningkatan berfariatif. Ukuran keberhasilan jika ditinjau dengan kepadatan kunjungan wisatawan maka akan berimplikasi terhadap pendapatan asli daerah saja dari hasil retribusi yang didapatkan. Sementara tujuan mewujudkan pembangunan konsep ekowisata sebagai kawasan wisata yang mengedepankan pengelolaan lingkungan, pemulihan dan pelestarian kawasan wisata alam serta rekreasi belum secara optimal digalakkan.

Tabel. 4.7.
 Hasil Perhitungan Kunjungan WNI – WNA
 Thn 2003 hingga 2008 Dinas Pariwisata Kota Ternate

No	Uraian	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	WNI	24,425	15,268	14,680	39,309	41,238	45,647
2	WNA	247	40	235	132	243	392
Jumlah		24,672	15,308	14,915	39,441	41,481	46,039

Sumber : Data Dinas Pariwisata Kota Ternate tahun 2009.

Sebagaimana diketahui meskipun kenaikan angka wisatawan relative meningkat namun, kualitas produk yang ditawarkan serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang belum secara maksimal terpenuhi. Hal tersebut terjadi akibat belum adanya pemahaman akan fungsi dan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai sumber pemasukan daerah dari sektor ekowisata, mengingat ekowisata memang bukan wisata massal, melainkan wisata eksklusif. Kegiatan pengelolaan kawasan ekowisata pantai Sulamadaha merupakan proses berkelanjutan, sehingga pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang dapat dilakukan berdasarkan kajian study kelayakan ekowisata dengan melakukan penilaian diantaranya terhadap :

1. Penentuan potensi sumber daya alam dan kelayakan keanekaragaman yang tersedia perluasan dan atraksi di kawasan objek wisata,

2. Mengevaluasi fasilitas dan infra struktur wisata yang tersedia dan kesesuaiannya dengan permintaan pasar,
3. Mengidentifikasi produk yang paling tepat untuk dikembangkan sebagai basis sumberdaya dan potensi pasar yang berkembang agar proyek dapat berkesinambungan,
4. Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terkait dengan pengembangan produk ekowisata serta upaya pemasaran produk ekowisata.

Dengan hasil study kelayakan tersebut maka dapat dievaluasi secara lebih cermat guna mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dan tepat dalam rangka untuk melakukan perencanaan proyek wisata selanjutnya. Sebab dengan adanya pemantauan atas rencana-rencana, maka didapatkan perbandingan kinerja dengan ukuran yang telah dibuat dan memutuskan apakah perlu ada perubahan terhadap rencana dan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Penilaian prestasi kerja menurut Utomo, adalah proses untuk mengukur prestasi kerja dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu.

Dengan berdasarkan terhadap penilaian prestasi kerja maka evaluasi dapat segera dilakukan melalui perbaikan-perbaikan yang diperlukan baik terhadap permasalahan-permasalahan ekowisata yang muncul maupun terhadap

rincian program-program pengembangan di kawasan pantai Sulamadaha. Dengan analisis study kelayakan data dasar hasil rincian hasil keunggulan maupun kelemahan masing-masing objek dan atraksi wisata yang diperlukan dalam perencanaan wisata.

Berdasarkan kajian terhadap kawasan wisata alam pantai Sulamadaha secara teoritis, pengembangan kawasan wisata pantai Sulamadaha berimplikasi pada proyek penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang ditargetkan untuk dapat meningkatkan pengunjung dan wisatawan ke daerah objek wisata pantai Sulamadaha. Seperti yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan – permasalahan yang masih menjadi persoalan tersebut mestinya di evaluasi terhadap kegiatan dan proyek sesuai untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan yang sudah dicapai dan mana yang belum mendapat perhatian.

Oleh sebab itu, maka berdasarkan data analisis terhadap kawasan wisata tersebut rekomendasi evaluasi pengembangan bagi kawasan pantai Sulamadaha adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang atraksi wisata yang hingga saat ini mengalami kerusakan serta minimnya perawatan terhadap bangunan – bangunan wisata dengan memaksimalkan tingkat pengawasan pada kawasan objek wisata tersebut.
2. Perbaikan terhadap penataan kawasan atau zonasi lahan bagi para pelaku industri kecil masyarakat yang masih belum tertata dengan

baik serta penentuan tanda batas bagi lahan yang di khususkan bagi kepentingan konservasi alam di sekitar area objek wisata alam.

3. Peningkatan upaya promosi, dengan menawarkan produk atraksi wisata yang paling diminati oleh wisatawan asing maupun lokal melalui berbagai media cetak maupun elektronik dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan dan keunikan, otentisitas, origanilitas serta penawaran produk wisata yang berbeda dari daerah-daerah lainnya.
4. Perbaikan infrastruktur transportasi, seperti mutu layanan dan penataan lahan parkir khususnya bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang bermukim di kawasan wisata alam pantai Sulamadaha.
5. Penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata serta pendidikan dan pemahaman kaidah-kaidah dan prinsip pengembangan ekowisata yang melindungi pelestarian lingkungan alam pada kawasan ekowisata.
6. Peningkatan peran kelembagaan dan organisasi yang ada sehingga terlibat aktif proyek pembangunan ekowisata.

2. Faktor-faktor yang menghambat realisasi program ekowisata dalam meningkatkan kualitas objek wisata alam di kota Ternate.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya tersebut di atas maka untuk mengetahui ukuran kegagalan ataupun keberhasilan suatu kebijakan yang direalisasikan kedalam bentuk program dapat ditinjau dari hasil evaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Suatu evaluasi kinerja sangat penting dilakukan untuk mampu menciptakan suatu gambaran yang tepat mengenai efektifitas kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja tersebut tidak hanya di tujukan untuk penilaian serta perbaikan proses suatu kinerja yang buruk tetapi juga ditujukan sebagai langkah awal perubahan kebijakan yang bertujuan untuk mencari titik kelemahan hambatan terhadap ketidak berhasilan suatu program kegiatan.

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara terhadap informan, maka hambatan dan kendala-kendala dalam upaya mewujudkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan berkompeten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan adalah :

1. Kebijakan program pengembangan kawasan objek daya tarik wisata belum menjangkau aspek penting potensi wisata dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan wisata berbasis ekowisata.

2. Minimnya anggaran dana yang tersedia dari APBD, memunculkan indikasi terhambatnya realisasi program kegiatan pembangunan wisata.
3. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan objek daya tarik wisata di kawasan wisata alam serta minimnya pengawasan terhadap objek wisata alam yang menimbulkan sanitasi lingkungan, berpengaruh terhadap mutu dan kualitas lingkungan.
4. Minimnya pemahaman terhadap pembangunan dengan menerapkan konsep objek wisata alam (ekowisata) serta prinsip-prinsipnya bagi para pelaku wisata yang bermukim di kawasan wisata sehingga kesadaran terhadap lingkungan sering diabaikan.
5. Belum adanya indikator keberhasilan dalam upaya mengukur tingkat kesuksesan pengimplementasian program dan hasil yang di perolehnya dalam pengembangan kawasan objek wisata alam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut aspek-aspek penting dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan objek daya tarik wisata alam yang berkualitas dan bermutu dapat terealisasi, maka alternatif strategi perencanaan pembangunan objek daya tarik wisata yang dapat dijadikan sebagai solusi adalah sebagai berikut :

1. Aspek perencanaan pembangunan objek daya tarik wisata yang antara lain mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang

- (tata ruang wilayah objek wisata), standarisasi, koordinasi lintas sektoral, serta pendanaan.
2. Aspek pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ekowisata dan mampu memanfaatkan potensi objek daya tarik wisata tersebut secara lestari serta mendukung upaya konservasi lingkungan.
 3. Aspek sarana dan prasarana, sebagai alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam dan sebagai pengendalian terhadap kerusakan lingkungan.
 4. Aspek peran serta masyarakat, melalui kesempatan-kesempatan berusaha masyarakat secara bertahap sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ketersediaan tenaga pengawasan yang intensif di kawasan objek wisata alam.
 5. Aspek penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan objek daya tarik wisata, sosial dan ekonomi yang diharapkan nantinya dapat menyediakan informasi bagi pengembangan, pemanfaatan dan pembangunan kawasan objek daya tarik wisata sebagai tujuan wisatawan.

Dengan evaluasi program serta perbaikan kinerja yang mengacu pada kelima aspek tersebut di atas maka diharapkan akan terjadi perubahan yang mengarah pada peningkatan kualitas kinerja yang lebih optimal lagi.

Peningkatan kualitas program perencanaan ekowisata harus berpegang pada prinsip dasar pengembangan pariwisata alam, yaitu berbasis pada alam, bermanfaat untuk masyarakat lokal, berkelanjutan, mengutamakan kepuasan wisatawan, dan memiliki unsur pendidikan lingkungan. Oleh karena itu diharapkan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak (*stakeholder*), peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta penyelesaian permasalahan teknis, sehingga upaya mewujudkan serta memajukan industri pariwisata di daerah kota Ternate dapat diwujudkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belum maksimalnya kinerja aparat dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan objek wisata alam pantai Sulamdaha serta perumusan program kegiatan perencanaan strategis yang belum merangkum semua prioritas pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip konsep ekowisata.
2. Kendala yang di hadapi dalam merealisasikan program kegiatan adalah pada minimnya anggaran dana serta program kegiatan yang disetujui oleh pemerintah daerah sehingga dalam memfasilitasi dan realisasi program kegiatan objek wisata pantai Sulamadaha tersendat.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan kota Ternate sebagai kota budaya dan pariwisata maka penulis menyarankan beberapa hal yang dapat diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Perumusan program kegiatan perencanaan strategis diharapkan dapat menitikberatkan perhatian terhadap peningkatan mutu dan lingkungan kawasan objek wisata alam di berbagai kawasan di daerah kota Ternate yang mengalami sanitasi lingkungan.
2. Diharapkan pada pihak terkait untuk dapat lebih mengoptimalkan perhatiannya dalam perlindungan lingkungan dan ekosistem di setiap kawasan objek wisata alam yang hingga kini sangat memprihatinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi (Makalah) *Pedoman Evaluasi LAK Unit Kerja di Lingk. BPKP = Bandung.*
- Azis Dwi Alfian (2009) Makalah. PDF *Sifat dan Konsep Program Kerja*, -----

- Bambang Wahyudi (2002) *Penilaian Kinerja* http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.df.
- Echols dan Shadily, (2000 : 220), *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*. Jakarta--

- Fandeli, C. (1999). *Pengembangan Ekowisata dengan Paradigma baru Pengelolaan Areal Konservasi*. Makalah dalam lokakarnya Paradigma Baru Manajemen Konservasi. Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta
- Hakim L. 2004. *Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang. Bayumedia Publishing Sudarto.
- Husnul Khotimah Thardan di 08.45 (2010) <http://tyaeducationjournals.blogspot.com/2008/04/desain>.
- Hutagalung, M. H. (1998) *Fenomena Ke-Indonesiaan*. Mahardika. Jakarta.-----

- Ishak Saefulbachri, Tague-Sutcliffe (1996) Project Management with MS Project Application laporan mengartikan evaluasi sebagai "*a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils*".-----
- Iwan, Nugroho. *Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan* Th. XII (2) Januari-Maret 2007: 44-57. <http://www.osun.org/ekowisata-pdf-5.html>
- Janianton Damanik & Helmut F. Weber (2006) *Perencanaan Ekowisata – Dari Teori Ke Aplikasi*, C.V. Andi Offset. Yogyakarta.

- Janko Jovanovic. *Pengertian Tujuan Dan Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan* /<http://dansite.wordpress.com/2009/04/10/>
- Oka. A Yoeti, 2004.-----, PT Pradnya Paramita. Jakarta
- Olsen dan Eadie *Perencanaan strategis* <http://pojok-waroenkopi.blogspot.com/2008/07/peran-perencanaan-strategis-pada.html>--
- Mejia, dkk (2004) *Model of Performance Appraisal* : Gomez-Mejia, et.al., 2001. *Managing Human Resource*, New Jersey: Prentice Hall. 2.4.2.
- Muhammad Taufiq (2006) *Project Management Body of Knowledge, (PMBOK)* <http://pukebramantio.blogspot.com/2010/03/definisi-ciri-dan-jenis-proyek.html>.
- Moleong, J.L., (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial* PT. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Nuryanti, W. 1999. *Pariwisata sebagai ilmu dan profesi*. Seminar pendidikan tinggi pariwisata. Surakarta.
- Rencana Strategi satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate Tahun 2006 – 2010.
- Riant Nugroho 2002, *Public Policy Pt Elex Media Komputindo*. Jakarta.
- Rusli Andi Atjo, (2008). *Peninggalan Sejarah di Pulau Ternate*. PT Cikoro Tri Rasuandar. Jakarta.
- Rusli Andi Atjo, (2008). *Orang Ternate dan Kebudayaanya*. PT Cikoro Tri Rasuandar. Jakarta.
- Salehudin, (2009). *Artikel - Pendekatan Evaluasi Kinerja (Penelitian Program)*. -----
- Suhanda 2003, *Artikel Konsep Dasar Ekowisata (Perencanaan Ekowisata)*-----

- Schuler & Jackson, (1996) *Evaluasi Kinerja* <http://shelmi.wordpress.com/2009/02/27/evaluasi-kinerja/>.

Siagan, Sondang P. 1985. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi*, Terjemahan oleh St. Dian Jung. Jakarta. .PT: Bina Aksara.

Terry Tachjan 2008 *Program 2008. Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Truenrth.

Umar (2002) Makalah (IPM Kabupaten Bandung 2002 - RPJMD Kabupaten Bandung.-----

Utomo, Tri Widodo W. (http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.df).

Werther, B. William and Keith Davis, 1986. "*Personnel management And Human Resource*, 2nd ed., Singapore: McGraw-Hill Book Company.

Wiwik D Pratiwi. *Konsep-konsep Perencanaan Pariwisata*. <http://www.ar.itb.ac.id/wdp/archives/category/tourism-courses/>

Yusran Ekoturisme Di Indonesia: Prospek, Tantangan Dan Strategi Pengembangannya. <http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/02201/yusran.htm>

-----Artikel, (2008) *Untuk menyambut Tahun Kunjungan Wisata 2008 (Visit Indonesia Year 2008) events* di seluruh Tanah Air Indonesia, 8 Mei 2008.-----

-----Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat (2009), Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari.

[http://blog.jobvity.com/jobs/pengertian-eskalasi-manajemen-proyek.](http://blog.jobvity.com/jobs/pengertian-eskalasi-manajemen-proyek)

<http://www.tekbar.net/id/hackers-and-security/crm--implementation-failure-rate-data-has-serious.html>

<http://pukebramantio.blogspot.com/2010/03/definisi-ciri-dan-jenis-proyek.html>

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Hasmy Samsudin

JABATAN : Sekertaris Dinas Pariwisata Kota Ternate

1. Prioritas pembangunan pariwisata kota Ternate ? mengapa ?
2. Bagaimana prospek pembangunan objek wisata alam (ekowisata) kota Ternate?
3. Hambatan dan kendala pengimplementasian program?
4. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan objek wisata alam ?
5. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup khususnya pada kawasan objek wisata alam?
6. Sarana dan prasarana penunjang di kawasan objek wisata alam / ekowisata?
7. Jumlah peningkatan arus kunjungan terhadap kawasan objek wisata alam pantai Sulamadaha?

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA



Jawaban

1. Prioritas pembangunan pariwisata kota Ternate ? mengapa ?

"...Pembangunan pariwisata di kota Ternate adalah diprioritaskan pada penataan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kawasan pantai Sulamadaha karena memiliki panorama yang indah dan menarik kunjungan wisatawan sehingga hasil atau income yang didapatkan dalam penerimaan retribusi pajak meningkat".

2. Bagaimana prospek pembangunan objek wisata alam (ekowisata) kota Ternate?

"Sampai saat ini dinas pariwisata kota Ternate sedang melakukan pembangunan kawasan objek wisata alam, sejarah dan budaya. Kegiatan pembangunan saat ini masih dalam tahapan merenovasi ataupun pemugaran serta penyediaan sarana dan prasarana obyek wisata".

3. Hambatan dan kendala pengimplementasian program?

'Implementasi program kegiatan renstra khususnya di pantai Sulamadaha adalah dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung dari tahun 2007 hingga 2009 telah terealisasi, namun di tahun 2010 ini, akibat krisis keuangan dan ketidakstabilan kondisi perekonomian sehingga tidak semua program kegiatan yang di canangkan di tahun 2010 dapat terealisasi'.

4. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan objek wisata alam ?

"Masyarakat ikut andil dalam pembangunan kepariwisataan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata adalah sebagai penyediaan fasilitas pendukung kegiatan obyek wisata".

5. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup khususnya pada kawasan objek wisata alam?

"Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum terlaksana secara maksimal, masih banyaknya objek wisata alam yang belum dikelola dengan baik seperti pada objek wisata alam pantai Tolire, pantai Tobololo, dan kawasan danau Laguna".

6. Sarana dan prasarana penunjang di kawasan objek wisata alam / ekowisata?

"Sarana dan fasilitas penunjang khususnya pada objek wisata alam telah tersedia khususnya namun masih sangat minim dan terbatas".

7. Jumlah peningkatan arus kunjungan terhadap kawasan objek wisata alam pantai Sulamadaha?

"Jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik".

Hasil Perhitungan Kunjungan WNI – WNA
Thn 2003 hingga 2008 Dinas Pariwisata Kota Ternate

No	Uraian	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	WNI	24,425	15,268	14,680	39,309	41,238	45,647
2	WNA	247	40	235	132	243	392
Jumlah		24,672	15,308	14,915	39,441	41,481	46,039

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Shanty B, SE

JABATAN : Kepala Seksi Kepariwisata Dinas Pariwisata Kota Ternate

1. Bagaimana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan objek wisata.

“kegiatan sosialisasi penyuluhan terhadap masyarakat sekitar telah diupayakan , dan bagi para pedagang di sekitar objek wisata untuk dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya agar selalu bersih dan sehat”.

“upaya sosialisasi dilakukan dengan tujuan pembangunan kawasan wisata dapat tercipta sapa pesona namun kesadaran masyarakat masyarakat masih sangat minim sehingga daerah objek wisata kerap kali menjadi tidak terawat”.

2. Hambatan-hambatan yang biasanya mempengaruhi implementasi program?

“Biasanya kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian program adalah pada minimnya dana selain itu keterlibatan stakeholder”.

3. Apakah ada PERDA yang mengatur tentang konservasi wilayah kawasan wisata alam ?

“Belum, hingga saat ini PERDA yang menyangkut pengelolaan wisata adalah PERDA Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dan Rekreasi dan Hiburan Umum”.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mr. Marx and Miss. Coby

Keterangan : Turis (Belanda)

1. What is your reason for visiting the city of Ternate?

Ternate is an island that has the potential and attractive to visit, and also because my great-grandfather came from Ternate person so I feel no kinship ties with the region and the people of Ternate. strong desire to come to the city of Ternate is arising from my curiosity to know further my hometown area.(Ternate merupakan kepulauan yang berpotensi dan menarik untuk di kunjungi, selain itu karena kakek buyut saya berasal dari orang ternate jadi saya merasa ada ikatan kekeluargaan dengan daerah dan orang ternate. keinginan kuat untuk datang ke kota ternate adalah timbul dari rasa penasaran saya untuk mengetahui lebih jauh lagi daerah kampung halaman saya).

2. What about your opinion of the ecotourism in Ternate town?

"It is very good, I like it. I like to see the beautiful places that I've never found in other".(sangat baik, saya menyukainya.saya senang melihat banyak tempat-tempat yang indah yang tak saya temukan di tempat lainnya".(Miss.ssssCoby).

3. what is your impression during stay in the Town of Ternate

"..I am very happy to be in this area, friendly people made me feel welcome. Eco-tourism here is very interesting and beautiful. Shortcomings lies in the professional handling of the environment and ecosystem sustainability. (saya sangat senang berada di daerah ini. penduduk yang ramah membuat saya merasa diterima. ekowisata di sini sangat menarik dan indah. kekurangannya terletak pada penanganan yang profesional terhadap lingkungan dan kelestarian ekosistem".(Mr. Marx).

4. Would you like to coming back visit Ternate anymore?

"Maybe I'll come back and Ternate will not be forgotten" (mungkin saya akan kembali, Ternate tidak akan terlupakan"(Miss. Coby)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mr. Michel

Keterangan : Turis (Irlandia)

1. What is your reason for visiting of Ternate?

I chose the city of Ternate, because, very interesting, do you know about the history of Ternate town famous as a center of spice trade from around the world.(saya memilih kota ternate sebab, sangat menarik, kau tahu tentang sejarah kota ternate yang terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dari seluruh dunia).

2. Where is your favorite place?

My favorite place besides lava spills like to view marks on stone angus, I also really liked the history of the famous Afo clove tree since already more than hundred years old. Ternate is very memorable for me, the food and the people are pious, cultured a wide variety of languages. (tempat favorit saya selain suka melihat bekas tumpahan lahar di batu angus, saya juga sangat menyukai sejarah pohon cengkik afo yang terkenal sejak udah berusia lebih dari ratusan tahun. ternate sangat berkesan bagi saya makanannya dan orang-orangnya yang alim, berbudaya memiliki ragam bahasa).

I really like climbing a mountain, it was a memorable adventure. in ireland, my country does not find towering mountains because, in my area are flat plains that cover several countries. (saya sangat suka mendaki gunung, hal itu merupakan sebuah petualangan yang berkesan. di irlandia, negara saya tidak menemukan gunung yang menjulang sebab, di daerah saya merupakan dataran yang rata mencakup beberapa negara).

3. How do you think of ecotourism in Ternate?

"Very interesting" (sangat menarik)

4. Would you like to come back here anymore?

I will come again if there is time and opportunity. (saya akan datang lagi jika punya waktu dan kesempatan).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mansur

Profil : Masyarakat

1. Apa yang membuat bapak tertarik mengelolah usaha di kawasan objek wisata ini ?

“karena sangat rame dan kalau bajaj banyak yang suka bali deng dapa untung banyak”. (karena sangat ramai dan jika berdagang di area ini banyak pembeli dan mendapat keuntungan yang sangat banyak).

2. Apakah dapat menunjang perekonomian keluarga ?

“iya dapat.”

3. Apakah bapak berencana untuk meneruskan usaha ini dalam waktu-waktu kedepan ?

“iya”

4. Apa harapan bapak kedepan terkait dengan objek wisata di kawasan pantai sulamadaha ini ?

“agar lebih maju lagi”.

5. Menurut bapak, hal-hal yang membuat kawasan ini ramai di kunjungi orang/wisatawan ?

“biasanya tu kalu hari libur, yang paling rame itu dua hari sebelum bulan puasa deng hari kedua setelah lebaran. Semua tempat wisata ini sasa deng orang-orang”. (biasanya kalau di hari libur, saat yang paling ramai di kunjungi adalah dua hari menjelang puasa Ramadhan dan hari kedua setelah lebaran Idul Fitri. Di semua tempat di kawasan wisata ini dipenuhi oleh wisatawan).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yusman

Profil : Masyarakat

1. Bagaimana perkembangan objek wisata alam pantai Sulamadaha sejak lima tahun terakhir ?

“ su terjadi banyak perubahan.

2. Perkembangan apa yang nampak dalam lima tahun terakhir ?

“banyak bangunan yang dong su bangun seperti, Panggung Wisata, Gajebo, Toilet, Jalan deng Tempat Parkir” (sudah terdapat banyaj pembangunan seperti, panggung wisata, Gazebo, Toilet, Jalan Setapak dan Tempat Parkir).

3. Hal menarik apa yang paling diminati oleh pengunjung ?

“kebanyakan yang datang suka batobo jadi torang biasanya kase sewa-sewa benen supaya torang dapa penghasilan dari situ lagi” (kebanyakan wisatawan yang suka berenang jadi kami biasanya menyewakan benen/bantal renang agar dapat menghasilkan penghasilan tambahan dari usaha tersebut).

4. Hal apa yang menjadi pokok permasalahan dalam objek wisata tersebut ?

“kadang-kadang dorang suka buang sampah sembarangan” (terkadang para pengunjung sering buang sampah di sembarang tempat).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rizal Marsaoly, SE

Profil : Staf Pendataan Dinas BAPEDA Kota Ternate

1. Seperti yang telah diketahui bahwa misi kota Ternate adalah membangun kota Ternate menuju kota budaya, kota perdagangan, kota pantai dan wisata, apakah langkah yang ditempuh Pemda dalam membangun kota pariwisata ?

1). Membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata daerah, karena sebagian besar objek wisata daerah berada di dekat kawasan penduduk yang minimnya pengetahuan serta apresiasi terhadap pariwisata.

2). Meningkatkan upaya promosi wisata dengan mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang bisa menarik wisatawan ke daerah.

3). Membangun sarana dan prasarana objek wisata yang berkualitas di semua kawasan wisata, namun hal ini masih dalam proses yang bertahap-tahap.

4). *Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, rapi dan tertata indah di kawasan wisata daerah.*

2. Apakah adanya intervensi dari pemerintah daerah terhadap perencanaan strategis khususnya pada dinas pariwisata kota ?

“ya ada, terutama dalam perumusan program kegiatan. Tidak semua program SKPD dapat disetujui, hanya sebagian yang dianggap prioritas saja sebab minimnya plafon anggaran yang ditujukan buat setiap instansi daerah”.

3. Apakah adanya upaya pengontrolan terhadap kinerja pembangunan daerah ?

“Ya. Pemerintah daerah kota Ternate, terus melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan akan menindak tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran”.

4. Apakah yang masih menjadi permasalahan dalam bidang kepariwisataan daerah kota Ternate saat ini ?

“Permasalahan yang masih ditemui dalam bidang kepariwisataan ini seperti; keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang kepariwisataan yang masih sangat minim, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung yang hingga kini masih terus diupayakan, masih belum optimalnya penataan kawasan wisata, dan masih terbatasnya informasi kepariwisataan kota Ternate.

5. Apakah sasaran pembangunan kota Ternate sebagai kota wisata ?

“sasaran pembangunannya yaitu diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan oleh karena itu dibutuhkan penyediaan lahan dan penyiapan infra struktur perdagangan dan pariwisata yang memadai”.



RENCANA PROGRAM
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA TERNATE
(2006-2010)

UNIVERSITAS TERBUKA

**RENCANA PROGRAM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TERNATE**

KOTA : TERNATE
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RENSTRA-SKPD PERIODE : 2006 – 2010

No	Kebijakan	Program	Indikator Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pagu Indikatif		KET
					(Rp)	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Apratur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2007	64.000.000	APBD	
2	Meningkatkan Administrasi Kantor	Administrasi Kantor	Penyusunan Rippda	2007	110.000.000	APBD	
3	Peningkatan Penataan Objek Wisata Batu Angus	Pengembangan Objek Wisata	Jumlah Fasilitas Objek Wisata Batu Angus Tersedia	2007	125.000.000	APBD	
4	Tersedianya Sarana Dan Pelestarian Kebudayaan	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Pengadaan Bendi	2007	300.000.000	APBD	
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	2007	115.000.000	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala /Mobil Jabatan	2007	9.000.000	APBD	
7	Peningkatan Penataan Objek Wisata Pantai Sulamadaha	Pengembangan Objek Wisata	Jumlah Fasilitas Objek Wisata Pantai Sulamadaha Tersedia	2007	125.000.000	APBD	
8	Tersedianya Sarana Dan Pelestarian Kebudayaan	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Pengadaan Gong	2007	50.000.000	APBD	
9	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Pemasaran	Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara Dalam Dan Luar Negeri	2007	145.000.000	APBD	
10	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Sarana Dan Prasarana Aparatur	Perlengkapan Gedung Kantor	2007	1.700.000	APBD	
11	Peningkatan Kualitas Rencana Pengembangan	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Bahan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	2007	110.000.000	APBD	
12	Tersedianya Sarana Pemeliharaan Aset Bangunan Bersejarah	Pemeliharaan Aset Bangunan Bersejarah	Pengadaan Mesin Potong Rumput	2007	50.000.000	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kwalitas SDM Yang Terlatih	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	2007	35.000.000	APBD	
14	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Perjalanan Dinas	2007	38.000.000	APBD	
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Objek Wisata	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Pengembangan Objek wisata	2007	150.000.000	APBD	
16	Terpeliharanya Aset Bangunan Bersejarah	Pemeliharaan Aset Pembangunan Bersejarah	Pengecatan Mesjid Sultan Ternate	2007	70.000.000	APBD	
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	2007	30.000.000	APBD	
18	Terpeliharanya Aset Bangunan Bersejarah	Pemeliharaan Aset Bangunan Bersejarah	Pengecatan Kedaton Sultan Ternate	2007	105.000.000	APBD	
19	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	2007	89.012.700	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mobilier	2007	4.655.000	APBD	
21	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	2007	1.900.000	APBD	
22	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pengadaan barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	2007	2.950.000	APBD	
23	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan ATK	2007	4.250.000	APBD	
24	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	Listrik Air dan Telepon	2007	9.000.000	APBD	
25	Meningkatnya PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Pariwisata	2007	55.000.000	APBD	
26	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan Perkantoran dan Perundang-undangan	Surat Kabar Majalah	2007	800.000	APBD	
27	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honores/PTT	2007	1.800.000	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Administrasi Keuangan	Honorium Jasa Administrasi Keuangan	2007	19.998.000	APBD	
29	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorium Jasa Kebersihan Kantor	2007	1.800.000	APBD	
30	Meningkatnya PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Pariwisata	2008-2010	PM	APBD	
31	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Bahan Habis Pakai Dan Cetak Penggandaan	2008-2010	PM	APBD	
32	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Perjalanan Dinas	2008-2010	PM	APBD	
33	Tersedianya Pemeliharaan Kantor	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Kantor	Alat Angkutan Kantor/Alat Rumah Tangga	2008-2010	PM	APBD	
34	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan Perkantoran Dan Perundang-Undang	Surat Kabar dan Majalah	2008-2010	PM	APBD	
35	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi	Penyediaan Jasa Administrasi	2008-2010	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorium Jasa Administrasi Keuangan	2008-2010	PM	APBD	
37	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Honorium Jasa Kebersihan Kantor	2008-2010	PM	APBD	
38	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2008-2010	PM	APBD	
39	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mobilier	2008-2010	PM	APBD	
40	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	2008-2010	PM	APBD	
41	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Baranag Cetakan dan Penggandaan	2008-2010	PM	APBD	
42	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Baranag Cetakan dan Penggandaan	2008-2010	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan ATK	2008-2010	PM	APBD	
44	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon	Listrik, Air Dan Telepon	2008-2010	PM	APBD	
45	Meningkatnya PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Pariwisata	2008-2010	PM	APBD	
46	Meningkatkan SDM Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Study Banding	Study Banding	2008-2010	PM	APBD	
47	Terpeliharanya Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	Pemeliharaan aset Bangunan Bersejarah	Renovasi Dan Relokasi Benteng Orange Ternate	2008-2010	PM	APBD	
48	Peningkatan Penataan Objek Wisata Batu Angus	Pengembangan Objek Wisata	Jumlah Fasilitas Objek Wisata Batu Angus Tersedia	2008	PM	APBD	
49	Tersedianya Sanggar Yang Berkualitas	Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Pembinaan Sanggar	2008	PM	APBD	
50	Mengembangkan Dan Meningkatkan Promosi Wisata	Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Wisata	2008	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Tersedianya Bahan Promosi Daerah	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Dan Luar Negeri	2008	PM	APBD	
52	Peningkatan Sarana Transportasi Objek Wisata	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Fasilitas Penunjang Objek Wisata (Perahu Kora-Kora 5 Buah)	2008	PM	APBD	
53	Terciptanya Nilai Tambah PAD Melalui Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	2008	PM	APBD	
54	Meningkatkan Peran Serta Swasta Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Daerah	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<p>Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu</p> <p>1. Melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan Kepada Masyarakat</p> <p>2. Melaksanakan Seminar Kebudayaan dan Pariwisata</p>	2008	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Meningkatkan Kesadaran Dan Cinta Budaya Daerah	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Lomba: 1. Cerita Rakyat 2. Puisi Rakyat (<i>Pantun</i>) 3. Permainan Rakyat 4. Tarian Daerah	2008	PM	APBD	
56	Terlaksananya Kegiatan Seni Dan Budaya	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Pembangunan Gedung Kesenian	2008	PM	APBD	
57	Terciptanya Pemahaman Tentang Benda Cagar Budaya Yang Bernilai Sejarah	Pemeliharaan Aset Bangunan Bersejarah	Penyuluhan Undang-undang No. 5 Tahun 1992.	2008	PM	APBD	
58	Peningkatan Sarana Transporatsi Objek Wisata	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Fasilitas Penuunjang Objek Wisata (Jet Sky 1 Buah)	2009	PM	APBD	
59	Meningkatkan Kesadaran Cinta Budaya Daerah	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Festival: 1. Busana Daerah 2. Musik Tradisional 3. Jojaru Ngongare	2009	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Tersedianya SDM Yang Berkualitas	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Sdm Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan /Mengikuti Asistensi Pemasaran Wisata Aparat Tehnik Kepariwisataan 	2009	PM	APBD	
61	Pengembangan Wisata Bahari Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Objek Wisata Bahari Tersedia	2009	PM	APBD	
62	Mengembangkan Dan Meningkatkan Promosi Wisata Secara Terencana Terarah Terpadu, Efektif Dan Efisien	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara Dalam Dan Luar Negeri	2009	PM	APBD	
63	Pengembangan Promosi Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	2009	PM	APBD	
64	Meningkatkan Peran Serta Swasta Dan Masyarakat Untuk Mendukung Jasa Kepariwisataan Daerah	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Priwisata	2009	PM	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Meningkatkan Pemahaman SDM	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM Bidang Budaya Dan Pariwisata	2009	PM	APBD	
66	Peningkatan Pengembangan Dan Penataan Objek Wisata	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Fasilitas Sarana Objek Tersedia	2010	PM	APBD	
67	Terciptanya Kondisi Objek Wisata Yang Aman, Indah, Serta Menarik Kunjungan Wisatawan	Pemeliharaan Aset Bangunan Bersejarah	Honor Peliharaan Benteng, Masjid Sultan Ternate Kedaton Sultan Ternate	2010	PM	APBD	Tiap Tahun
68	Meningkatkan Dan Mengembangkan Perluasan Jaringan Informasi Pasar Wisata	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Dan Penguatan Data Base	2010	PM	APBD	
69	Peningkatan Sarana Penunjang Kegiatan Objek Wisata	Pengembangan Pariwisata	Jumlah Sarana Transportasi SPEED BOAD 1 Unit	2010	PM	APBD	
70	Tersedianya Duta Gita Bahana Nusantara Ke Tingkat Nasional	Pelestarian Dan Pengembanag Seni Budaya	Audisi Gita Bahana Nusantara	2010	PM	APBD	Tiap Tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Cinta Budaya Daerah	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya	Pagelaran Seni Dan Pertunjukan	2010	PM	APBD	
72	Meningkatkan Pemahaman Sdm	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM Bidang Budaya Dan Pariwisata	2010	PM	APBD	
73	Meningkatkan Dan Mengembangkan Perluasan Jaringan Informasi Pasar Wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	2010	PM	APBD	
74	Mengembangkan Dan Meningkatkan Promosi Wisata Secara Terencana Terarah Terpadu Efektif Dan Efisien	Pengembangan Pamasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara Dalam Dan Luar Negeri	2010	PM	APBD	
75	Meningkatkan Dan Mengembangkan Perluasan Jaringan Informasi Pasar Wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	2010	PM	APBD	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

BIODATA

Nama : NURDINA, SS
N I M : 014944499
Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 25 Mei 1983
Registrasi Pertama : 2007.2
Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Negeri Inpres Bacan
(Halmahera Selatan) tahun 1989 – 1995.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua
Ternate (Maluku Utara) tahun 1995-1998.
3. Sekolah menengah Umum Negeri Ternate
(Maluku Utara) tahun 1998-2001.
4. Universitas Khairun Negeri Ternate (Maluku
Utara) fakultas Sastra Inggris tahun 2001 –
2005
Alamat Tetap : Jl. Batu Angus, Kelurahan Sangaji Utara. RT
03/RW 05 Toloko – Ternate (MALUKU
UTARA).
Telephon / HP : 085240198493

Ternate, 8 November 2010

(NURDINA)

014944499